

## **Karakteristik Struktur Ekonomi Dan Disparitas Regional Di Indonesia, 2000-2010** **Jumadi<sup>1</sup>, Ernan Rustiadi<sup>2</sup>, Setia Hadi<sup>2</sup>**

### INFO NASKAH :

Diterima Mei 2022

Diterima hasil revisi Juni 2022

Terbit Juni 2022

### Keywords :

Struktur ekonomi, disparitas regional, karakteristik tipologi wilayah

### ABSTRACT

*Pembangunan (ekonomi) dalam jangka panjang telah membawa serangkaian perubahan mendasar (transformasi ekonomi) dalam perekonomian dan berdampak terjadinya kesenjangan antar wilayah/daerah di Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis struktur ekonomi dan disparitas regional dan nasional; karakteristik tipologi wilayah berdasarkan struktur ekonomi dan disparitas regional; serta faktor-faktor yang mempengaruhi disparitas regional di tujuh region selama 2000-2010.*

*Metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif, Shift Share Analysis, Indeks Williamson, Indeks Entropi Theil, Cluster Analysis, dan Regresi Data Panel. Wilayah studi meliputi tujuh region: Sumatera, Jawa-Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Selama 2000-2010, sektor jasa modern memiliki kontribusi paling besar terhadap perekonomian region Sumatera, Jawa-Bali, Maluku, dan nasional; sektor pertanian masih mendominasi perekonomian region Nusa Tenggara dan Sulawesi; dan sektor pertambangan & penggalian masih mendominasi perekonomian region Kalimantan dan Papua. Terdapat indikasi terjadinya gejala de-industrialisasi dalam perekonomian nasional dan region Jawa-Bali, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Telah terjadi transformasi ekonomi pada struktur ekonomi region Sumatera, Nusa Tenggara, Sulawesi, dan Papua, namun mengalami lompatan (jumping) pergeseran kontribusi dari sektor pertanian/sektor pertambangan & penggalian langsung oleh sektor jasa modern. Transformasi struktur sektor-sektor ekonomi dalam perekonomian nasional tidak diikuti oleh transformasi tenaga kerja sektoral secara proporsional. Kontribusi sektor jasa modern berkorelasi positif terhadap pendapatan per kapita regional dan berkorelasi negatif terhadap persentase penduduk miskin regional. Selama 2000-2010, disparitas antar region masih tergolong rendah, namun menunjukkan kecenderungan meningkat. Ketimpangan intra region menunjukkan kecenderungan menurun, kecuali region Jawa-Bali dan Nusa Tenggara. Disparitas intra region memberikan kontribusi paling besar terhadap disparitas regional dibandingkan disparitas antar region. Berdasarkan karakteristik indikator/penciri utama perkembangan struktur ekonomi dan disparitas regional, terdapat empat tipologi wilayah, yaitu: Tipologi I: Wilayah Tertinggal, Tipologi II: Wilayah Maju, Tipologi III: Wilayah Sedang Berkembang, dan Tipologi IV: Wilayah Transisi. Perubahan disparitas regional dipengaruhi oleh kontribusi sektor pertanian; pertambangan & penggalian; industri manufaktur; dan jasa modern. Rekomendasi kebijakan secara umum adalah pengembangan ekonomi wilayah yang dapat mendorong perubahan struktur ekonomi secara bertahap dan berkelanjutan dan mampu menurunkan disparitas regional, didasarkan atas karakteristik perkembangan struktur ekonomi dan disparitas regional serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.*

## **PENDAHULUAN**

Pembangunan dalam jangka panjang akan membawa serangkaian perubahan mendasar dalam struktur ekonomi suatu negara atau disebut transformasi ekonomi, yang semula lebih bersifat subsisten dan menitikberatkan pada sektor primer menuju ke struktur perekonomian yang lebih modern yang didominasi oleh sektor sekunder dan tersier. Dalam teori modernisasi, pembangunan ekonomi diarahkan untuk mencapai

<sup>1</sup> Mahasiswa S2, Program Studi Ilmu Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Perdesaan (PS PWD) IPB

<sup>2</sup> Prodi Ilmu Perencanaan Wilayah Institut Pertanian Bogor, (email: eman@indo.net.id)

kematangan struktur perekonomian nasional, yang dicirikan oleh semakin menurunnya pangsa relatif sektor pertanian disertai semakin meningkatnya pangsa relatif sektor industri dan jasa dan terjadinya peningkatan produktivitas di semua sektor ekonomi (Lewis, 1954; Chenery, 1980; Todaro dan Smith, 2006; Tambunan, 2001).. Menurut Winoto (1996) dan Hayami dan Ruttan (1971), sektor industri tidak akan mampu berkembang dengan baik dan perkembangannya akan disertai penurunan keuntungan apabila tidak didukung oleh perkembangan sektor pertanian yang kuat.

Sektor pertanian memiliki peranan yang besar dalam perekonomian suatu negara, terutama pada tahap-tahap awal pembangunan (Lewis, 1954; Johnston dan Mellor, 1961; Kuznets, 1964). Menurut Rostow (1960) *dalam* Todaro dan Smith (2006), sektor pertanian yang handal merupakan prasyarat bagi pembangunan sektor industri dan jasa. Menurut Clark *dalam* Nasoetion (1991), menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi melalui proses transformasi ekonomi dapat dicapai melalui peningkatan produktivitas tenaga kerja di setiap sektor dan transfer tenaga kerja dari sektor yang memiliki produktivitas tenaga kerja rendah ke sektor yang memiliki produktivitas tenaga kerja lebih tinggi

Di sisi lain, menurut Djojohadikusumo (1994), bahwa pembangunan ekonomi sebagai transisi yang ditandai oleh perubahan struktural, merupakan masa ketidakseimbangan yang dapat menyebabkan kesenjangan penyesuaian jangka panjang. Selaras hipotesis U terbalik Kuznets (1963), pada tahap awal pertumbuhan ekonomi distribusi pendapatan cenderung memburuk, namun pada tahap selanjutnya distribusi pendapatan akan membaik. Pembangunan memang tidak dapat pisahkan dari pertumbuhan ekonomi, namun pertumbuhan ekonomi di negara-negara berkembang termasuk Indonesia dinilai kurang berkualitas. Menurut Thomas *et al.* (2000), pertumbuhan yang berkualitas (*the quality of growth*) merujuk pada pertumbuhan ekonomi yang secara spesifik dapat menurunkan tingkat kemiskinan secara cepat, memperkecil ketimpangan struktural, pelestarian terhadap lingkungan hidup, dan terjadinya keberlanjutan pertumbuhan ekonomi itu sendiri.

Pembangunan (ekonomi) mengakibatkan perekonomian Indonesia mengalami pertumbuhan cukup tinggi terutama pada periode 1970-1975 sebesar 6,95 persen, 1975-1980 sebesar 7,92 persen, 1990-1995 sebesar 7,13 persen, dan pada 2005-2010 sebesar 5,49 persen. Pertumbuhan ekonomi tersebut mengakibatkan perubahan struktural (transformasi ekonomi) dalam perekonomian Indonesia. Kondisi demikian mengakibatkan perbedaan perkembangan antar sektor-sektor ekonomi dan selanjutnya berdampak terjadinya kesenjangan antar wilayah/daerah di Indonesia. Pada tahun 1960, sektor pertanian masih mendominasi struktur perekonomian Indonesia dengan kontribusi mencapai 53,92 persen, kemudian diikuti sektor jasa<sup>3</sup> 31,73 persen dan sektor industri<sup>4</sup> 8,35 persen. Pada 2010, sektor jasa telah mendominasi struktur perekonomian Indonesia, dengan pangsa 46,78 persen, kemudian diikuti sektor industri 23,88 persen dan sektor pertanian 14,60 persen.

Terkait kesenjangan ekonomi antar wilayah menunjukkan bahwa selama 2000-2010 kontribusi wilayah Jawa-Bali terhadap perekonomian nasional mencapai 59,89 persen hingga 62,15 persen, sementara itu kontribusi wilayah Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara hanya berkisar 0,33 persen hingga 1,64 persen. Dalam hal distribusi penduduk

<sup>3</sup> Agregasi dari sektor perdagangan, hotel, dan restoran; pengangkutan dan komunikasi; keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan; dan jasa-jasa

<sup>4</sup> Merupakan sektor industri pengolahan

antar wilayah bahwa wilayah Jawa-Bali juga memiliki pangsa penduduk paling besar mencapai 59,54 persen hingga 60,66 persen. Kemudian, dalam hal distribusi pendapatan per kapita antar wilayah tahun 2000-2010 memperlihatkan bahwa wilayah Kalimantan memiliki pendapatan per kapita paling tinggi mencapai Rp 11,636 juta hingga Rp 13,688 juta, sedangkan wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Sulawesi paling rendah hanya berkisar Rp 2,346 juta hingga Rp 6,116 juta (Atas Dasar Harga Konstan 2000/ADHK 2000). Terkait dengan jumlah penduduk miskin selama 2004-2010, memperlihatkan bahwa wilayah Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara masih memiliki persentase penduduk miskin tergolong tinggi mencapai 20,08 persen hingga 37,27 persen, sedangkan wilayah Kalimantan memiliki persentase penduduk miskin paling rendah (7,32 hingga 10,46 %).

Dalam upaya meningkatkan pendapatan per kapita suatu negara melalui percepatan transformasi struktur ekonomi, dikenal teori jebakan pendapatan menengah (*middle income trap*). Istilah ini diperkenalkan oleh Eichengreen *et al.* (2013). *Middle-income trap* biasanya terjadi pada negara dengan pendapatan per kapita antara US\$ 12.000 hingga US\$ 15.000. Pada tahun 2011, pendapatan per kapita Indonesia baru mencapai US\$ 3.498 (BPS, 2012). Pemerintah Indonesia berkomitmen meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita nasional melalui percepatan transformasi struktur ekonomi, sebagaimana dituangkan dalam *Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2025*.

Penelitian ini bertujuan: (i) menganalisis struktur ekonomi dan disparitas regional di tujuh wilayah (region) dan nasional selama 2000-2010; (ii) menganalisis karakteristik tipologi wilayah berdasarkan struktur ekonomi dan disparitas regional di tujuh region selama 2000-2010; dan (iii) menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi disparitas regional di tujuh region selama 2000-2010. Wilayah studi meliputi tujuh wilayah (region), yaitu: (1) Sumatera; (2) Jawa-Bali; (3) Kepulauan Nusa Tenggara; (4) Kalimantan; (5) Sulawesi; (6) Kepulauan Maluku; dan (7) Papua. Pembagian wilayah studi ini didasarkan atas kesamaan karakteristik geografis, sosial-budaya, kesatuan dalam pulau dan/atau gugus kepulauan, perkembangan wilayah, serta perwilayahan (regionalisasi) di Indonesia menurut Bappenas dan BPS.

## METODOLOGI

Kebutuhan data sekunder utama dalam penelitian ini adalah PDRB (sektoral, regional, dan provinsi), luas wilayah, jumlah penduduk dan penduduk miskin, dan pendapatan per kapita regional dan provinsi tahun 2000-2010. Pengelompokan sembilan sektor ekonomi oleh BPS, dalam penelitian ini dilakukan agregasi dan disagregasi sehingga menjadi tujuh kelompok sektor ekonomi (Lampiran 1). Pengelompokan sektor ekonomi didasarkan atas teori dasar tahapan transformasi ekonomi, yang membagi sektor ekonomi dalam tiga kategori besar, yaitu sektor primer, sekunder, dan tersier. Sektor primer terdiri dari sektor pertanian dan sektor pertambangan & penggalan; sektor sekunder adalah sektor industri manufaktur; dan sektor tersier adalah sektor jasa modern. Metode/alat analisis yang digunakan adalah: metode deskriptif, *Shift Share Analysis*, indeks Williamson, indeks entropi Theil, *Cluster Analysis*, dan Regresi Data Panel.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Perkembangan Struktur Ekonomi

Selama 2000-2010, aktivitas ekonomi secara sektoral (kecuali sektor pertambangan dan penggalian dan sektor industri ekstraktif) di tujuh region dalam skala besar masih terkonsentrasi di region Jawa-Bali dan sebagian Sumatera. Hal ini ditunjukkan oleh besarnya nilai tambah dari aktivitas sektor-sektor ekonomi di region tersebut, dimana sektor jasa modern; industri manufaktur; dan pertanian memiliki nilai tambah paling besar dibandingkan lima region lainnya (Tabel 1).

Jika dilihat dari kontribusi sektoral selama 2000-2010, sektor jasa modern yang merupakan sektor tersier memiliki kontribusi paling besar terhadap perekonomian region Sumatera, Jawa-Bali, dan Maluku (termasuk perekonomian nasional), dengan pangsa (*share*) mencapai 23,26 persen hingga 49,07 persen. Sektor pertanian yang merupakan sektor primer masih mendominasi perekonomian region Nusa Tenggara dan Sulawesi (pangsa 28,10 % hingga 35,38 %) dan sektor pertambangan dan penggalian (sektor primer) masih mendominasi perekonomian region Kalimantan dan Papua (pangsa 25,48 % hingga 60,63 %). Sektor industri manufaktur (sektor sekunder) memberikan kontribusi cukup besar bagi perekonomian region Jawa (dan nasional) (pangsa 21,78 % hingga 29,19 %), namun kontribusinya masih paling kecil (2,97 % hingga 17,25 %) bagi perekonomian enam region lainnya dibandingkan sektor pertanian dan jasa modern (Gambar 1).

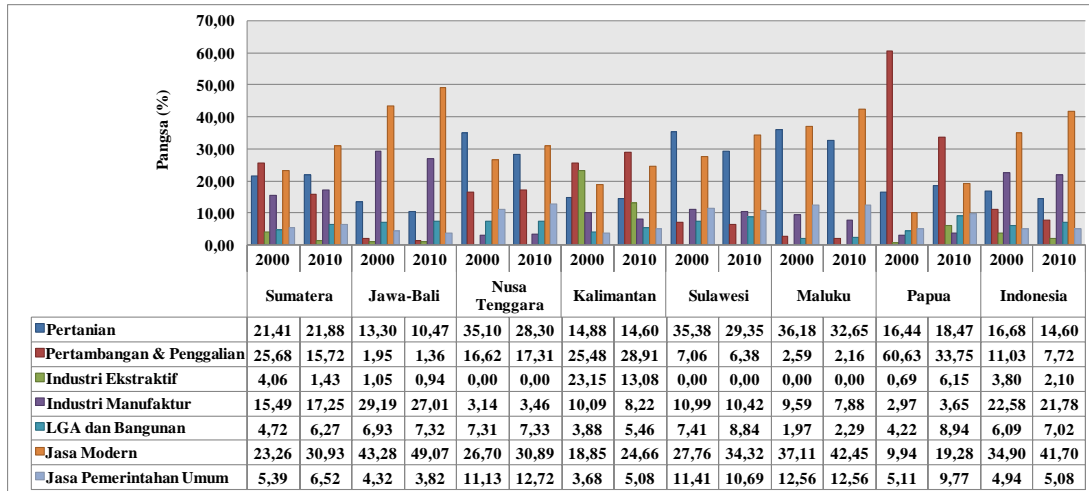
Tabel 1. PDRB/PDB Sektoral di Tujuh Region dan Nasional ADHK 2000, 2000 dan 2010

Region	Tahun	Nilai Sektor-sektor Ekonomi (Rp Juta)							PDRB
		Pertanian	Pertambangan & Penggalian	Industri Ekstraktif	Industri Manufaktur	LGA & Bangunan	Jasa Modern	Jasa Pemerintahan Umum	
1. Sumatera	2000	66.748.292	80.072.699	12.657.834	48.287.180	14.708.714	72.542.232	16.800.344	311.817.295
	2010	102.414.981	73.598.846	6.681.076	80.753.360	29.331.498	144.776.602	30.504.491	468.060.855
2. Jawa-Bali	2000	108.727.080	15.925.887	8.574.179	238.668.307	56.631.486	353.958.044	35.290.016	817.774.999
	2010	143.634.965	18.671.951	12.914.841	370.531.331	100.488.562	673.223.384	52.459.065	1.371.924.098
3. Nusa Tenggara	2000	7.042.608	3.335.045	-	630.429	1.466.508	5.357.287	2.233.845	20.065.722
	2010	9.222.458	5.641.760	-	1.127.078	2.387.770	10.065.412	4.143.947	32.588.426
4. Kalimantan	2000	19.574.662	33.522.472	30.457.364	13.281.657	5.103.777	24.795.046	4.837.489	131.572.467
	2010	27.781.095	55.019.033	24.889.779	15.650.838	10.397.698	46.930.098	9.666.843	190.335.383
5. Sulawesi	2000	20.263.574	4.041.435	-	6.283.822	4.243.916	15.903.017	6.535.378	57.281.142
	2010	31.103.534	6.759.519	-	11.040.239	9.365.963	36.368.419	11.333.384	105.971.059
6. Maluku	2000	1.681.772	120.328	-	445.826	91.796	1.725.232	583.935	4.648.888
	2010	2.379.211	157.284	-	574.262	167.195	3.093.351	915.177	7.286.481
7. Papua	2000	3.677.668	13.560.215	154.755	663.373	943.518	2.224.090	1.143.743	22.367.363
	2010	5.782.639	10.565.087	1.924.560	1.141.528	2.797.230	6.036.311	3.058.589	31.305.944
PDB Indonesia	2000	227.715.656	150.578.081	51.844.133	308.270.594	83.189.715	476.504.948	67.424.748	1.365.527.875
	2010	322.318.883	170.413.480	46.410.256	480.818.637	154.935.915	920.493.579	112.081.496	2.207.472.246

Sumber: BPS, 2001-2011 (Diolah)

Besarnya kontribusi sektor primer dan sektor tersier (termasuk sektor sekunder) dalam perekonomian suatu wilayah dapat dijadikan salah satu indikator tingkat perkembangan wilayah. Wilayah dengan struktur perekonomian masih didominasi oleh sektor primer mengindikasikan bahwa wilayah tersebut relatif masih tertinggal. Sebaliknya, wilayah dengan struktur perekonomian telah didominasi oleh sektor tersier (termasuk sektor sekunder) merupakan wilayah yang relatif lebih maju. Menurut Murty (2000), aktivitas sektor sekunder dan sektor tersier seperti industri, perdagangan, perbankan, dan asuransi yang memberikan nilai tambah lebih besar, cenderung terkonsentrasi di wilayah yang relatif lebih maju, biasanya juga memiliki infrastruktur wilayah relatif lebih baik dan jumlah penduduk yang besar (potensi *demand*) (konsep aglomerasi). Khususnya region Jawa-Bali dan Sumatera, selain memiliki infrastruktur

wilayah yang relatif lebih baik, juga memiliki potensi *demand* lebih besar dibandingkan region lainnya. Kondisi demikian mengakibatkan perbedaan karakteristik dan tingkat perkembangan antar sektor ekonomi di suatu region, sehingga dalam jangka panjang berdampak terjadinya kesenjangan antar wilayah/daerah.



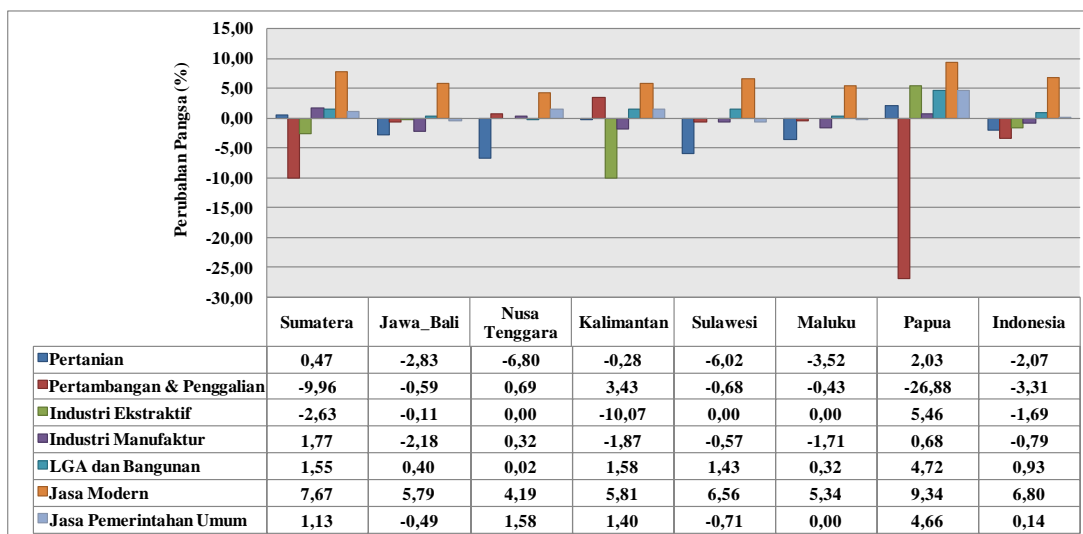
Sumber: BPS, 2001-2011 (Diolah)

Gambar 1. Pangsa PDRB/PDB Sektoral di Tujuh Region dan Nasional, 2000 dan 2010

Skala aktivitas ekonomi dan besaran kontribusi sektor industri manufaktur dapat juga dijadikan indikator untuk menunjukkan kuat atau tidaknya struktur perekonomian suatu wilayah. Namun hal ini tergantung dari karakteristik dan jenis industri manufaktur yang dikembangkan serta kuat atau tidaknya keterkaitannya dengan sektor primer, terutama sektor pertanian. Hal ini selaras dengan Winoto (1996) dan Hayami dan Rutan (1971), bahwa sektor industri tidak akan mampu berkembang dengan baik dan perkembangannya akan disertai dengan penurunan keuntungan jika tidak didukung oleh perkembangan sektor pertanian yang kuat. Sektor pertanian memiliki peranan yang besar dalam perekonomian suatu negara, terutama pada tahap-tahap awal pembangunan (Lewis, 1954; Johnston dan Mellor, 1961; Kuznets, 1964). Hal ini selaras dengan Rostow (1960) dalam Todaro dan Smith (2006), bahwa sektor pertanian yang handal merupakan prasyarat bagi pembangunan sektor industri dan jasa untuk mencapai tahapan tinggal landas menuju pembangunan ekonomi berkelanjutan.

Dari segi perubahan kontribusi sektoral selama 2000-2010, sektor jasa modern mengalami peningkatan kontribusi terhadap perekonomian nasional dan perekonomian seluruh region, berkisar 4,19 persen hingga 9,34 persen. Sektor pertambangan dan penggalian mengalami penurunan kontribusi paling besar di region Papua (-26,88 %) dan Sumatera (-9,96 %), namun mengalami peningkatan kontribusi di region Kalimantan (3,43 %); sektor industri ekstraktif mengalami penurunan pangsa di region Kalimantan (-10,07 %) dan Sumatera (-2,63 %), mengalami peningkatan kontribusi di region Papua (5,46 %). Sektor pertanian mengalami penurunan kontribusi di region Nusa Tenggara (-6,80 %), Sulawesi (-6,02 %), Maluku (-3,52 %), Jawa-Bali (-2,83 %), dan nasional (12,07), namun mengalami peningkatan kontribusi di region Sumatera (0,47 %) dan Papua (2,03 %). Sementara itu, sektor industri manufaktur mengalami penurunan kontribusi terhadap perekonomian nasional (-0,79), Jawa-Bali (-2,18 %), Kalimantan (-1,87 %), Sulawesi (-0,57 %), dan Maluku (-1,71 %), namun mengalami peningkatan di region Sumatera (1,77 %), Nusa Tenggara (0,32 %), dan Papua (0,68

%). Sektor LGA dan bangunan dan sektor jasa pemerintahan umum mengalami peningkatan kontribusi paling besar di region Papua, masing-masing sebesar 4,72 persen dan 4,66 persen (Gambar 2).



Sumber: BPS, 2001-2011 (Diolah)

Gambar 2. Perubahan Pangsa PDRB/PDB Sektoral di Tujuh Region dan Nasional, 2000-2010

Berdasarkan hasil analisis *Differential Shift*, selama 2000-2010 sektor pertanian mengalami perlambatan pertumbuhan (tidak memiliki keunggulan daya saing/kompetitif) di region Jawa-Bali (indeks *differential shift* -0,094), Nusa Tenggara (-0,106), dan Maluku (-0,001). Sedangkan di empat region lainnya sektor pertanian mengalami percepatan pertumbuhan (memiliki keunggulan kompetitif) dengan indeks *differential shift* 0,004 hingga 0,157. Sektor pertambangan & penggalian mengalami perlambatan pertumbuhan di region Sumatera (-0,213) dan Papua (-0,353), di lima region lainnya masih memiliki keunggulan kompetitif (0,041 hingga 0,560). Sektor industri manufaktur memiliki keunggulan kompetitif di region Sumatera (0,113), Nusa Tenggara (0,228), dan Sulawesi (0,194), namun mengalami perlambatan pertumbuhan di region Jawa-Bali (-0,007), Kalimantan (-0,381), dan Maluku (-0,272). Sedangkan sektor jasa modern mengalami perlambatan pertumbuhan di region Jawa-Bali (-0,030), Nusa Tenggara (-0,053), dan Kalimantan (-0,039), namun mengalami percepatan pertumbuhan di region Papua (0,782), Sulawesi (0,355), dan Sumatera (0,064). Di tingkat nasional, sektor pertanian; pertambangan dan penggalian; industri ekstraktif; dan industri manufaktur mengalami perlambatan pertumbuhan dengan indeks *differential shift* berkisar -0,057 hingga -0,721. Sedangkan sektor LGA dan bangunan; jasa modern; dan jasa pemerintahan umum mengalami percepatan pertumbuhan, indeks *differential shift* 0,046 hingga 0,315. Selama 2000-2010, perekonomian nasional tumbuh sebesar 61,70 persen, ditunjukkan oleh nilai *regional share* 0,617 (Tabel 2).

Tabel 2. Indeks *Differential Shift* dan *Proportional Shift* ADHK 2000, 2000 dan 2010

Region	<i>Differential Shift</i>						
	Pertanian	Pertambangan & Penggalian	Industri Ekstraktif	Industri Manufaktur	LGA dan Bangunan	Jasa Modern	Jasa Pemerintahan Umum
1. Sumatera	0,119	(0,213)	(0,367)	0,113	0,132	0,064	0,153
2. Jawa-Bali	(0,094)	0,041	0,611	(0,007)	(0,088)	(0,030)	(0,176)
3. Nusa Tenggara	(0,106)	0,560		0,228	(0,234)	(0,053)	0,193
4. Kalimantan	0,004	0,510	(0,078)	(0,381)	0,175	(0,039)	0,336
5. Sulawesi	0,120	0,541		0,194	0,344	0,355	0,072
6. Maluku	(0,001)	0,175		(0,272)	(0,041)	(0,139)	(0,095)
7. Papua	0,157	(0,353)	11,541	0,161	1,102	0,782	1,012
<b>Proportional Shift</b>	(0,201)	(0,485)	(0,721)	(0,057)	0,246	0,315	0,046
<b>Regional Share</b>	<b>0,617</b>						

Sumber: Hasil Analisis

Jika dilihat dari perubahan kontribusi dan indeks *differential shift* sektor-sektor ekonomi selama 2000-2010, terdapat indikasi terjadinya gejala de-industrialisasi dalam perekonomian nasional dan regional. Hal ini ditunjukkan oleh kecenderungan penurunan kontribusi sektor industri manufaktur terhadap perekonomian nasional, region Jawa-Bali, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku berkisar -0,57 persen hingga -2,18 persen dan sektor tersebut mengalami perlambatan pertumbuhan di region Jawa-Bali (indeks *differential shift* -0,007); Kalimantan (-0,381); Maluku (-0,272), dan nasional (-0,057) dalam periode 2000-2010. Hasil studi Priyarsono (2011), menunjukkan hal yang sama bahwa dalam periode 2003-2008 terdapat indikasi kuat terjadinya gejala de-industrialisasi di Indonesia, yang ditandai antara lain oleh: penurunan kontribusi sektor manufaktur dalam perekonomian nasional; penyerapan tenaga kerja sektor manufaktur yang stagnan; dan rata-rata pertumbuhan tenaga kerja sektor manufaktur negatif.

Jika dilihat dari struktur tiga sektor ekonomi utama (sektor pertanian; industri manufaktur; dan jasa modern) di tujuh region selama 2000-2010, hanya region Jawa-Bali (dan nasional) yang memiliki struktur ekonomi yang relatif lebih kuat dan matang dibandingkan enam region lainnya. Dalam perekonomian region Jawa-Bali (dan nasional), selama 2000-2010 kontribusi sektor jasa modern telah mendominasi struktur perekonomiannya, kemudian diikuti oleh sektor industri manufaktur dan sektor pertanian (struktur: jasa modern-industri manufaktur-pertanian). Di enam region lainnya, sektor industri manufaktur memiliki kontribusi paling kecil, karena dalam skala besar aktivitas sektor industri manufaktur masih terkontrasi di region Jawa-Bali (struktur tahun 2010: jasa modern-pertanian-industri manufaktur) (Tabel 3). Struktur ekonomi yang demikian adalah rapuh dan belum matang, karena tidak didukung pengembangan sektor industri manufaktur, tentunya berbasis potensi, sumberdaya, dan kapasitas yang dimiliki wilayah tersebut. Hal ini juga mengindikasikan telah terjadi lompatan (*jumping*) dalam proses transformasi ekonomi dari sektor primer langsung ke sektor tersier.

Selanjutnya, jika dilihat dari pergeseran/perubahan struktur empat sektor ekonomi utama (pertanian; pertambangan dan penggalian; industri manufaktur; dan jasa modern), selama 2000-2010 telah terjadi transformasi ekonomi pada struktur ekonomi region Sumatera, Nusa Tenggara, Sulawesi, dan Papua. Sementara itu, struktur ekonomi region Jawa-Bali, Kalimantan, Maluku, dan Indonesia tidak mengalami pergeseran. Namun demikian, pola transformasi ekonomi di empat region tersebut tidak berjalan secara bertahap, mengalami lompatan (*jumping*) pergeseran kontribusi dari sektor

pertanian/sektor pertambangan dan penggalian langsung oleh sektor jasa modern, tanpa diikuti terlebih dahulu peningkatan kontribusi sektor industri manufaktur menggantikan sektor pertanian (Tabel 3).

Tabel 3. Struktur dan Pola Transformasi Empat Sektor Ekonomi Utama di Tujuh Region, 2000-2010

Struktur dan Pangsa Sektor Ekonomi (%)							
2000		2010		2000		2010	
Sektor	Pangsa	Sektor	Pangsa	Sektor	Pangsa	Sektor	Pangsa
<b>1. Sumatera</b>				<b>5. Sulawesi</b>			
Tambang	25,68	Jasa	30,93	Pertanian	35,38	Jasa	34,32
Jasa	23,26	Pertanian	21,88	Jasa	27,76	Pertanian	29,35
Pertanian	21,41	Industri	17,25	Industri	10,99	Industri	10,42
Industri	15,49	Tambang	15,72	Tambang	7,06	Tambang	6,38
<b>2. Jawa-Bali</b>				<b>6. Maluku</b>			
Jasa	43,28	Jasa	49,07	Jasa	37,11	Jasa	42,45
Industri	29,19	Industri	27,01	Pertanian	36,18	Pertanian	32,65
Pertanian	13,30	Pertanian	10,47	Industri	9,59	Industri	7,88
Tambang	1,95	Tambang	1,36	Tambang	2,59	Tambang	2,16
<b>3. Nusa Tenggara</b>				<b>7. Papua</b>			
Pertanian	35,10	Jasa	30,89	Tambang	60,63	Tambang	33,75
Jasa	26,70	Pertanian	28,30	Pertanian	16,44	Jasa	19,28
Tambang	16,62	Tambang	17,31	Jasa	9,94	Pertanian	18,47
Industri	3,14	Industri	3,46	Industri	2,97	Industri	3,65
<b>4. Kalimantan</b>				<b>Indonesia</b>			
Tambang	25,48	Tambang	28,91	Jasa	34,90	Jasa	41,70
Jasa	18,85	Jasa	24,66	Industri	22,58	Industri	21,78
Pertanian	14,88	Pertanian	14,60	Pertanian	16,68	Pertanian	14,60
Industri	10,09	Industri	8,22	Tambang	11,03	Tambang	7,72

Keterangan:

Pertanian = Sektor Pertanian

Industri = Sektor Industri Manufaktur

Tambang = Sektor Pertambangan & Penggalian

Jasa = Sektor Jasa Modern

Sumber: BPS, 2001-2011 (Diolah)

Tahapan transformasi ekonomi di empat region tersebut tidak sesuai dengan teori tahapan transformasi ekonomi. Menurut Chenery (1980); Todaro dan Smith (2006); dan Tambunan (2001), bahwa tahapan atau proses transformasi ekonomi ditandai dengan semakin menurunnya kontribusi sektor primer (pertanian) terhadap pembentukan PDB, kemudian diikuti dengan peningkatan kontribusi sektor sekunder (industri manufaktur) dan tersier (jasa modern), seiring dengan peningkatan PDB atau pendapatan nasional per kapita. Dengan demikian, transformasi ekonomi menunjukkan terjadinya peralihan kegiatan ekonomi dari perekonomian tradisional ke perekonomian modern. Hasil penelitian Budiharsono (1996), menunjukkan hal yang sama, bahwa pola



transformasi struktural antar daerah pada kurun waktu 1969-1987 terjadi penyimpangan apabila dibandingkan dengan pola normal Chenery-Syrquin. Hal ini karena relatif kecilnya keterkaitan antar sektor, terutama antara sektor pertanian dengan sektor industri baik dalam proses produksi maupun penyerapan tenaga kerja. Hasil studi yang hampir sama oleh Kurniawan (2011), bahwa pergeseran struktur ekonomi yang terjadi di Indonesia periode 1971-2008 diawali pada kondisi dimana sektor jasa telah mendominasi perekonomian, selanjutnya terjadi peningkatan peran sektor industri menggeser sektor pertanian dan akhirnya mendominasi perekonomian Indonesia. Hasil studi Saraan (2006), bahwa selama periode 1980-2004 telah terjadi transformasi struktural perekonomian di Indonesia, yaitu transformasi sektor pertanian ke sektor industri.

Jika diperbandingkan antara kontribusi PDB sektoral terhadap serapan/pangsa tenaga kerja sektoral selama 2004-2010, bahwa kontribusi sektor pertanian yang semakin kecil, namun memiliki serapan/pangsa tenaga kerja yang masih besar (Gambar 3.a). Sebaliknya, kontribusi PDB industri (industri pengolahan) yang cukup besar, namun memiliki serapan/pangsa tenaga kerja yang rendah (Gambar 3.b). Berbeda dengan sektor jasa modern, besaran kontribusi PDB jasa modern lebih proporsional terhadap serapan/pangsa tenaga kerja sektor tersebut (Gambar 3.c). Pada tahun 2004 pangsa sektor pertanian 16,11 persen, namun pangsa tenaga kerja sektor pertanian mencapai 43,33 persen, kemudian pada 2010 kontribusi sektor pertanian hanya 14,60 persen, serapan/pangsa tenaga kerja sektor pertanian masih sebesar 38,35 persen dari total tenaga dalam perekonomian nasional. Sedangkan kontribusi PDB industri pada tahun 2004 sebesar 25,69 persen, namun serapan/pangsa tenaga kerja hanya 11,81 persen, pada tahun 2010 kontribusi PDB sektor industri 23,88 persen, serapan tenaga kerja 12,78 persen. Kontribusi PDB jasa modern dengan serapan tenaga kerja relatif proporsional. Pada tahun 2004 kontribusi PDB jasa modern 37,33 persen, serapan tenaga kerjanya 38,67 persen, kemudian pada tahun 2010 PDB jasa modern 41,70 persen, serapan tenaga kerjanya 42,33 persen (Tabel 4).

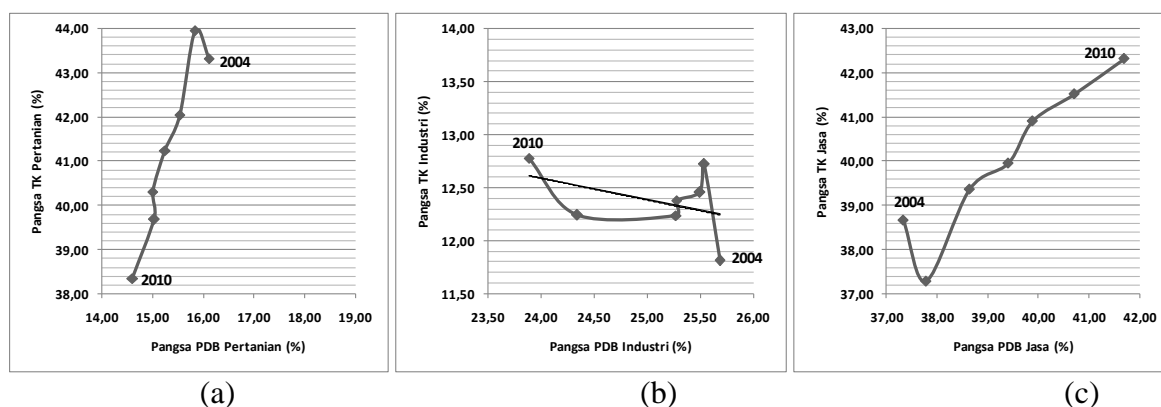
Tabel 4. Pangsa PDB Sektoral dan Pangsa Tenaga kerja Sektoral, 2004-2010

Pangsa (%)	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
<b>PDB Pertanian</b>	16,11	15,84	15,53	15,25	15,00	15,03	14,60
<b>PDB Industri Pengolahan</b>	25,69	25,54	25,50	25,28	25,27	24,34	23,88
<b>PDB Jasa Modern</b>	37,33	37,79	38,64	39,41	39,89	40,71	41,70
<b>Tenaga Kerja Pertanian</b>	43,33	43,97	42,05	41,24	40,30	39,68	38,35
<b>Tenaga Kerja Industri Pengolahan</b>	11,81	12,72	12,46	12,38	12,24	12,24	12,78
<b>Tenaga kerja Jasa Modern</b>	38,67	37,28	39,37	39,96	40,92	41,53	42,33

Sumber: SAKERNAS, 2004-2010 (Diolah)

Dari kondisi tersebut menunjukkan masih besarnya tenaga kerja yang bekerja di sektor pertanian, karena tidak terjadi transfer tenaga kerja dari sektor pertanian yang memiliki produktivitas rendah ke sektor lainnya yang memiliki produktivitas lebih tinggi, terutama sektor industri. Kondisi demikian akan menjadi beban bagi sektor pertanian, sehingga sektor tersebut memiliki produktivitas rendah, implikasinya kesejahteraan tenaga kerja sektor pertanian juga menjadi rendah. Selain itu, kondisi ini juga menunjukkan bahwa telah terjadinya transformasi struktur sektor-sektor ekonomi dalam perekonomian nasional tidak diikuti transformasi tenaga kerja sektoral secara proporsional. Menurut Clark dalam Nasoetion (1991), merumuskan bahwa pertumbuhan ekonomi melalui proses transformasi dapat dicapai melalui beberapa cara,

yaitu: (i) peningkatan produktivitas tenaga kerja di setiap sektor dan (ii) transfer tenaga kerja dari sektor yang produktivitas tenaga kerjanya rendah ke sektor yang produktivitas tenaga kerjanya lebih tinggi.



Sumber: SAKERNAS, 2004-2010 (Diolah)

Gambar 3. Grafik Perbandingan Kontribusi PDB Sektoral dengan Pangsa Tenaga Kerja Sektoral, 2004-2010 (a) Sektor Pertanian, (b) Sektor Industri, dan (c) Sektor Jasa Modern

Kurniawan (2011), meneliti tentang transformasi struktural perekonomian Indonesia, pendekatan model Input-Output tahun 1971-2008 menunjukkan bahwa perkembangan struktur tenaga kerja di Indonesia menunjukkan pola yang tidak biasa (*unusual pattern*) dan bertentangan dengan teori perkembangan tenaga kerja. Tinjauan tentang tingkat produktivitas tenaga kerja memberikan justifikasi kesimpulan atas apa yang terjadi bahwa sebenarnya tenaga kerja yang bergeser dari sektor pertanian tidak beralih ke sektor yang produktivitasnya lebih tinggi. Daya penyebaran yang tinggi pada sektor-sektor sekunder tidak diikuti derajat kepekaan yang tinggi pada sektor-sektor primer mengindikasikan tidak adanya *link and match* antara industri yang dibangun dengan sumber bahan baku yang tersedia. Strategi industrialisasi yang kurang tepat menyebabkan proses de-industrialisasi di Indonesia berjalan tidak alami dan cenderung negatif.

### Perkembangan Wilayah

Selama 2000-2010, distribusi (sebaran) penduduk dan aktivitas ekonomi belum merata antar region, masih terkonsentrasi di region Jawa-Bali dan sebagian Sumatera. Selama kurun waktu tersebut secara riil terjadi peningkatan pendapatan per kapita dan penurunan persentase penduduk miskin di seluruh region secara signifikan, meskipun distribusi/sebarannya masih tidak merata antar region. Region Kalimantan memiliki pendapatan per kapita paling tinggi serta memiliki persentase penduduk miskin paling rendah. Region Nusa Tenggara memiliki pendapatan per kapita cukup rendah dan memiliki persentase penduduk miskin cukup tinggi (Tabel 5). Region Maluku memiliki jumlah penduduk, PDRB, dan pendapatan per kapita paling rendah serta memiliki persentase penduduk miskin cukup besar. Region Papua memiliki kepadatan penduduk paling rendah, memiliki pendapatan per kapita cukup tinggi, namun masih memiliki persentase penduduk miskin paling tinggi. Kondisi tersebut menunjukkan adanya perbedaan karakteristik dan tingkat perkembangan antar wilayah (region). Hal ini dalam jangka panjang akan berdampak terjadinya kesenjangan (disparitas) antar wilayah tersebut (Tabel 5).

Jika dilihat dari pertumbuhan, region Papua memiliki rata-rata pertumbuhan penduduk paling tinggi (2,92 %) dan region Jawa-Bali paling rendah (1,04 %). Region Sulawesi memiliki rata-rata pertumbuhan PDRB dan pendapatan per kapita paling tinggi (6,35 % dan 4,71 %). Sementara itu, region Kalimantan memiliki rata-rata pertumbuhan PDRB paling rendah (3,77 %) serta region Papua dan Kalimantan memiliki rata-rata pertumbuhan pendapatan per kapita paling rendah, masing-masing 1,24 persen dan 1,64 persen (Gambar 4).

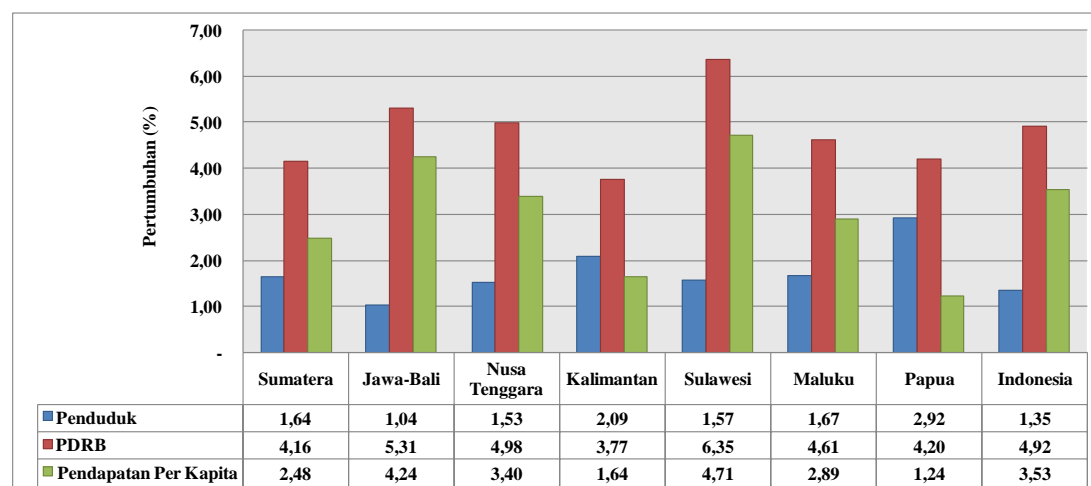
Tabel 5. Luas Wilayah, Kepadatan Penduduk, Penduduk Miskin, serta PDRB dan Pendapatan Per Kapita (ADHK 2000) di Tujuh Region, 2000 dan 2010

Region	Luas Wilayah (km <sup>2</sup> )	Tahun	Penduduk (jiwa)	Kepadatan Penduduk (jiwa/km <sup>2</sup> )	PDRB (Rp Juta)	Pendapatan Per Kapita (Rp Juta)	Penduduk Miskin*)	
							Jumlah (jiwa)	Persentase (%)
1. Sumatera	480.793,28	2000	42.472.700	88	311.817.295	7,342	7.999.700	17,57
		2010	50.425.763	105	468.060.855	9,282	6.652.700	13,19
2. Jawa-Bali	135.218,34	2000	124.443.200	920	817.774.999	6,571	20.809.200	16,03
		2010	137.954.400	1.020	1.371.924.098	9,945	17.494.800	12,68
3. Nusa Tenggara	67.290,42	2000	7.831.700	116	20.065.722	2,562	2.224.000	26,62
		2010	9.118.700	136	32.588.426	3,574	2.023.500	22,19
4. Kalimantan	544.150,07	2000	11.307.700	21	131.572.467	11,636	1.325.700	10,76
		2010	13.905.700	26	190.335.383	13,688	1.018.000	7,32
5. Sulawesi	188.522,36	2000	14.881.500	79	57.281.142	3,849	2.656.000	16,82
		2010	17.325.631	92	105.971.059	6,116	2.347.000	13,55
6. Maluku	78.896,53	2000	1.981.400	25	4.648.888	2,346	514.600	24,25
		2010	2.213.800	28	7.286.481	3,291	469.700	20,08
7. Papua	416.060,32	2000	2.338.900	6	22.367.363	9,563	915.500	37,27
		2010	2.952.900	7	31.305.944	10,602	1.017.900	34,47
Indonesia	1.910.931,32	2000	205.132.000	107	1.365.527.875	6,657	35.529.200	16,42
		2010	231.683.094	121	2.207.472.246	9,528	30.005.700	12,82

Keterangan:

\*) = Perbandingan Penduduk Miskin Tahun 2004 dan 2010

Sumber: BPS, 2001-2011 (Diolah)



Sumber: BPS, 2001-2011 (Diolah)

Gambar 4. Rata-rata Pertumbuhan Penduduk serta PDRB dan Pendapatan Per Kapita (ADHK 2000) di Enam Region dan Nasional, 2000-2010

Kepadatan dan pertumbuhan penduduk menjadi permasalahan tersendiri bagi suatu wilayah, misalnya terkait penyediaan permukiman, lapangan pekerjaan, sarana dan prasarana, dan masalah sosial lainnya serta berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil studi empiris Amstrong dan Taylor (2001), bahwa kepadatan dan penambahan penduduk dapat memberikan efek positif ataupun negatif terhadap pertumbuhan

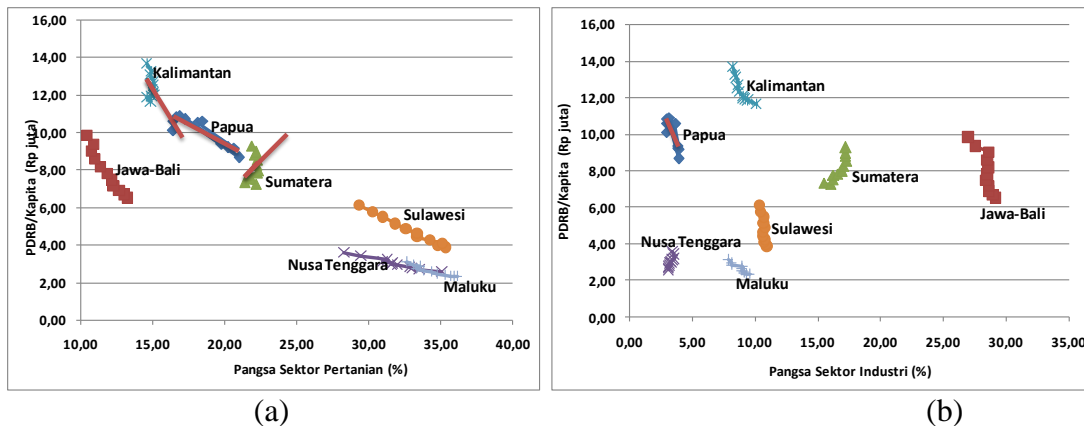
ekonomi. Ketika sebagian besar penduduk, terutama penduduk usia produktif berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi, maka pertumbuhan ekonomi akan positif, namun jika sebaliknya, maka pertumbuhan ekonomi akan rendah, stagnan, bahkan negatif. Di sisi lain, jumlah penduduk yang besar justru merupakan potensi *demand* yang besar. Menurut Todaro dan Smith (2006), populasi penduduk yang besar merupakan unsur penting yang akan memacu pembangunan ekonomi, karena merupakan pasar potensial, sumber permintaan (*demand*) berbagai jenis produk barang dan jasa, yang akan menggerakkan berbagai aktivitas ekonomi, menciptakan skala ekonomis (*economies of scale*), dan sumber pasokan atau penawaran tenaga kerja murah dalam jumlah yang memadai. Kondisi demikian pada gilirannya merangsang tingkat output atau produksi agregat yang lebih tinggi lagi.

Region Jawa-Bali dan Sumatera selain memiliki jumlah penduduk yang besar, juga memiliki skala aktivitas ekonomi yang besar. Hal ini menunjukkan sebaran aktivitas ekonomi dan penduduk belum merata antar region, masih terkonsentrasi di region Jawa-Bali dan sebagian Sumatera. Selaras pernyataan Nazara (2010), bahwa konsentrasi penduduk mengikuti konsentrasi aktivitas ekonomi, atau sebaliknya (konsep aglomerasi). Namun demikian, distribusi penduduk dan aktivitas ekonomi yang masih terkonsentrasi di region Jawa-Bali dan Sumatera dalam jangka panjang menjadi permasalahan tersendiri bagi proses pembangunan dan transformasi ekonomi, karena berdampak pada terjadinya kesenjangan pembangunan antar daerah atau wilayah di Indonesia.

#### **Korelasi Pangsa PDRB Sektoral dengan PDRB Per Kapita dan Kemiskinan**

Tujuan pembangunan (ekonomi) nasional antara lain untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi sekaligus pendapatan per kapita serta menurunkan kemiskinan dan mengurangi ketimpangan struktural. Untuk mencapai tujuan tersebut, antara lain dapat ditempuh melalui pengembangan sektor-sektor unggulan dan memiliki nilai strategis yang mampu mempercepat peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita serta mengurangi kemiskinan. Kemampuan sektor ekonomi dalam meningkatkan pendapatan per kapita dan menurunkan kemiskinan berbeda-beda antar region, yang ditunjukkan kemiringan *slope* atau besar/kecilnya koefisien *slope* untuk sektor tersebut di suatu region.

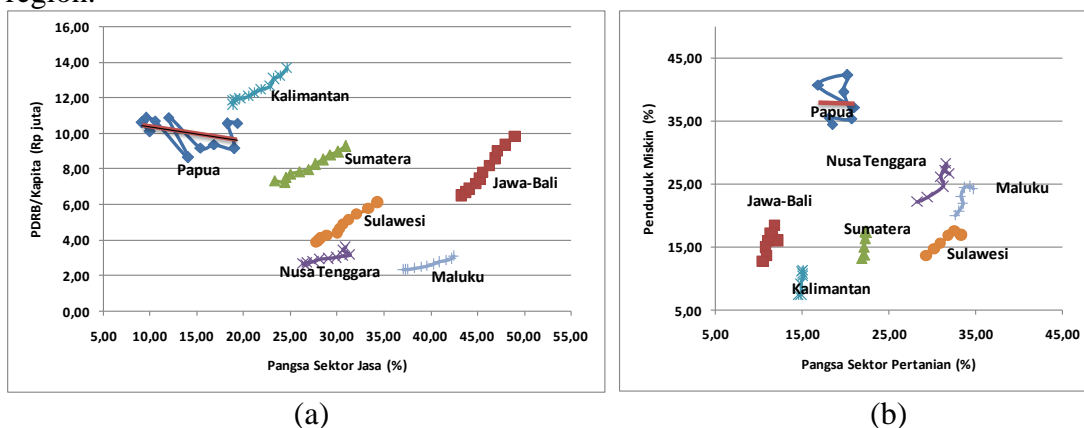
Korelasi antara peningkatan aktivitas atau kontribusi sektor-sektor ekonomi (PDRB sektoral) terhadap pendapatan per kapita (PDRB/kapita) dan kemiskinan (persentase penduduk miskin) di tujuh region selama 2000-2010, bahwa peningkatan skala aktivitas atau kontribusi sektor jasa modern dapat meningkatkan pendapatan per kapita (korelasi positif), kecuali di region Papua (Gambar 6.a) sekaligus menurunkan jumlah penduduk miskin regional (korelasi negatif), kecuali di region Nusa Tenggara (Gambar 7.b). Dengan demikian, sektor jasa modern memiliki nilai strategis karena pengembangan sektor ini mampu meningkatkan pendapatan per kapita sekaligus menurunkan jumlah penduduk miskin regional.



Sumber: BPS, 2000-2010 (Diolah)

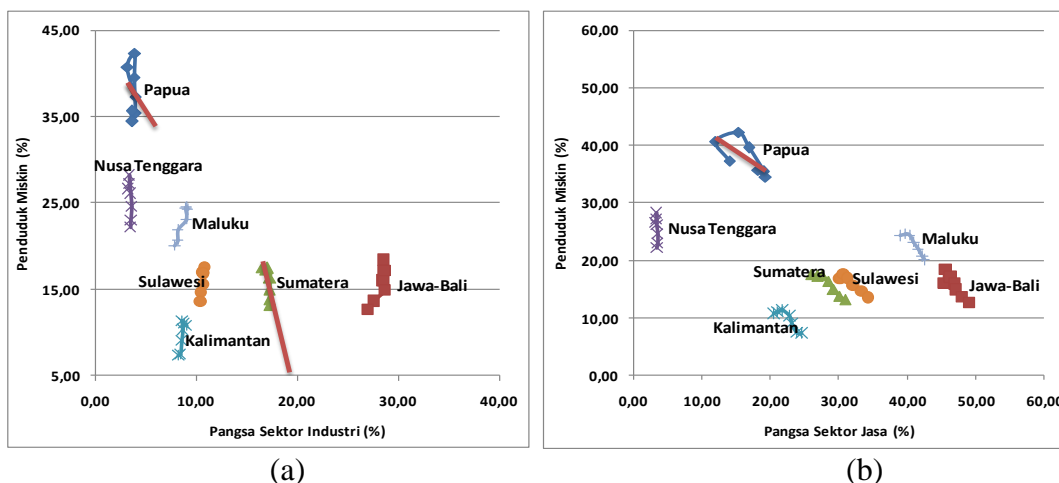
Gambar 5. (a) Korelasi Pangsa Sektor Pertanian dengan PDRB/Kapita dan (b) Korelasi Pangsa Sektor Industri dengan PDRB/Kapita ADHK 2000, 2000-2010

Berbeda dengan sektor pertanian, bahwa penurunan kontribusi sektor tersebut justru dapat meningkatkan pendapatan per kapita regional (korelasi negatif), kecuali di region Sumatera (Gambar 5.a) dan dapat menurunkan jumlah penduduk miskin regional (korelasi positif), kecuali di region Papua (Gambar 6.b). Demikian halnya penurunan kontribusi sektor industri manufaktur juga dapat meningkatkan pendapatan per kapita (korelasi negatif), kecuali di region Sumatera dan Nusa Tenggara (Gambar 5.b) dan menurunkan jumlah penduduk miskin (korelasi positif), kecuali di region Sumatera dan Papua (Gambar 7.a). Kondisi ini sesuai dengan fakta bahwa selama periode 2000-2010 terjadi peningkatan pendapatan per kapita dan penurunan persentase penduduk miskin secara nyata, dimana dalam periode yang sama kontribusi sektor pertanian dan industri manufaktur secara nasional dan di beberapa region mengalami penurunan, namun kontribusi sektor jasa modern mengalami peningkatan secara nasional dan di seluruh region.



Sumber: BPS, 2000-2010 (Diolah)

Gambar 6. (a) Korelasi Pangsa Sektor Jasa dengan PDRB/Kapita, 2000-2010 dan (b) Korelasi Pangsa Sektor Pertanian dengan Persen Kemiskinan, 2004-2010

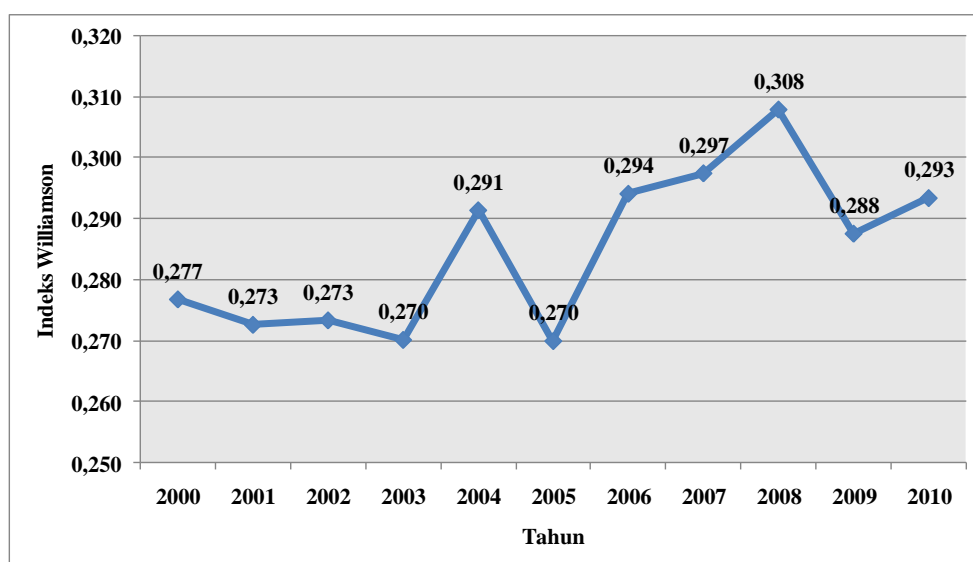


Sumber: BPS, 2000-2010 (Diolah)

Gambar 7. (a) Korelasi Pangsa Sektor Industri dengan Persen Kemiskinan, 2000-2010 dan (b) Korelasi Pangsa Sektor Pertanian dengan Persen Kemiskinan, 2004-2010

### Perkembangan Disparitas Regional

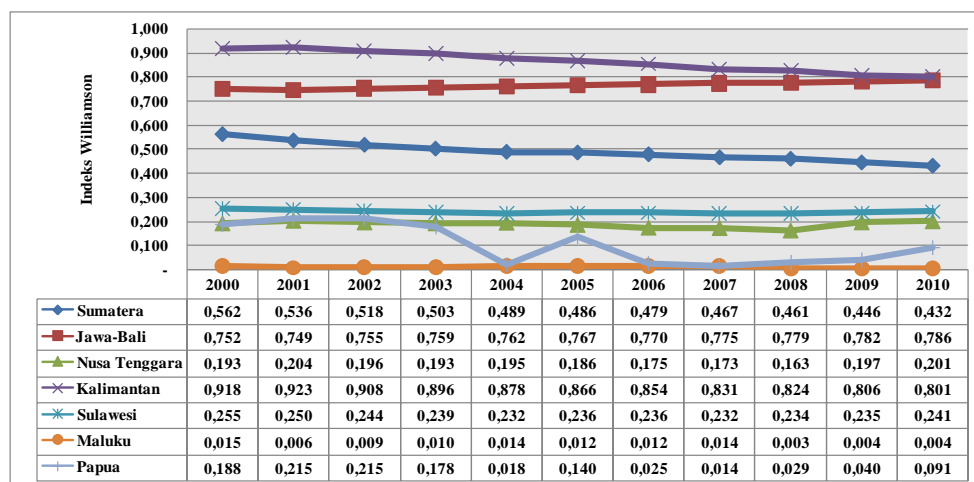
Berdasarkan hasil analisis Indeks Williamson, selama 2000-2010 disparitas antar region masih tergolong rendah (indeks 0,270 hingga 0,308), namun menunjukkan kecenderungan (*trend*) yang meningkat. Indeks disparitas paling rendah terjadi pada tahun 2005 (0,270) dan paling tinggi pada tahun 2008 (0,308) (Gambar 8). Selama 2000-2010, disparitas antar provinsi di dalam region (intra region) untuk region Kalimantan dan Jawa-Bali tergolong tinggi (indeks Williamson 0,749 hingga 0,923); region Sumatera tergolong sedang (0,432 hingga 0,562); dan region Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua tergolong rendah (0,004 hingga 0,555). Ketimpangan intra region menunjukkan trend menurun, kecuali region Jawa-Bali dan Nusa Tenggara (Gambar 9).



Sumber: Hasil Analisis

Gambar 8. Perkembangan Indeks Disparitas Williamson Antar Region, 2000-2010

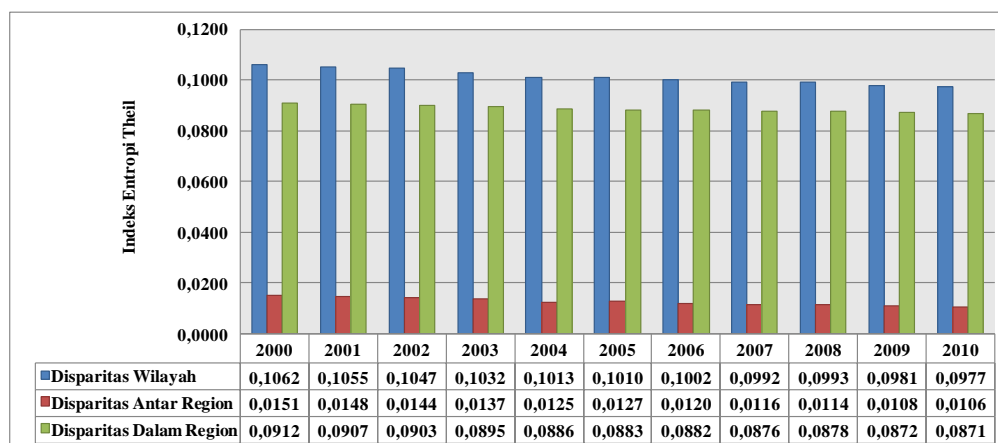
Hasil penelitian Satrio (2009), tentang ketimpangan pendapatan antar pulau di Indonesia periode 1996-2006 menggunakan Indeks Williamson, menunjukkan hasil yang hampir sama. Ketimpangan pendapatan antar pulau di Indonesia yang terbagi dalam enam pulau, tergolong rendah (indeks 0,210 hingga 0,261), namun menunjukkan *trend* yang menurun. Ketimpangan pendapatan antar propinsi di dalam pulau termasuk dalam kategori tinggi untuk Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Maluku-Papua (0,521 hingga 0,996), kategori rendah untuk Pulau Sulawesi (0,050 hingga 0,109), dan kategori sedang untuk Pulau Bali (0,379 hingga 0,498). Ketimpangan pendapatan dalam pulau menunjukkan *trend* yang menurun, kecuali Pulau Jawa dan Sulawesi.



Sumber: Hasil Analisis

Gambar 9. Perkembangan Indeks Disparitas Williamson Intra Region, 2000-2010

Berdasarkan hasil analisis indeks entropi Theil, menunjukkan *trend* penurunan disparitas regional, yang disebabkan oleh penurunan disparitas antar region (*between regions*) dan intra region (*within regions*) selama 2000-2010. Jika diurai (didekomposisi), disparitas intra region memberikan kontribusi paling besar terhadap disparitas regional dibandingkan disparitas antar region. Ketimpangan wilayah sebesar 85,81 persen hingga 89,14 persen disebabkan oleh disparitas intra region (proporsinya meningkat) dan hanya 10,86 persen hingga 14,19 persen disebabkan oleh disparitas antar region (proporsinya menurun) (Gambar 10).



Sumber: Hasil Analisis

Gambar 10. Perkembangan Indeks Disparitas Entropi Theil, 2000-2010

Besarnya kontribusi disparitas intra region (antar provinsi di dalam region) terhadap disparitas regional dibandingkan disparitas antar region menunjukkan variasi atau ketimpangan yang lebih besar antar provinsi di dalam region dibandingkan variasi atau ketimpangan antar region. Hasil penelitian yang sama dilakukan Pravitarsi (2009), tentang disparitas di Pulau Jawa (sebelum dan sesudah otonomi daerah) menggunakan indeks Williamson dan entropi Theil, bahwa disparitas antar provinsi memiliki derajat disparitas paling tinggi.

### Tipologi Wilayah

Berdasarkan hasil Analisis Gerombol (*Cluster Analysis*), terdapat empat gerombol (*cluster*) wilayah (*Cluster* 1, 2, 3, dan 4) (Tabel 6). Hasil analisis pengelompokan *cluster* tersebut didasarkan atas minimum keragaman dan/atau kedekatan jarak dalam *cluster* dari karakteristik indikator/penciri utama masing-masing region. Selanjutnya, dilakukan uji beda nyata (*least differential test*) terhadap seluruh indikator/penciri utama antar *cluster*. Uji beda nyata menggunakan ANOVA dengan taraf nyata 10 % atau selang kepercayaan 90 % (Tabel 7).

Tabel 6. Hasil Pengelompokan Gerombol (*Cluster Membership*) Wilayah di Indonesia

Case Number	Region	Cluster	Distance
1	Sumatera	4	3,314
2	Jawa-Bali	2	0,000
3	Nusa Tenggara	3	2,872
4	Kalimantan	4	3,314
5	Sulawesi	3	3,393
6	Maluku	3	3,437
7	Papua	1	0,000

Sumber: Hasil Analisis, Output SPSS 20

Berdasarkan ciri atau karakteristik indikator/penciri utama dari masing-masing *cluster* tersebut, maka *Cluster* 1 diberi nama Tipologi I: Wilayah Tertinggal; *Cluster* 2 = Tipologi II: Wilayah Maju; *Cluster* 3 = Tipologi III: Wilayah Sedang Berkembang; dan *Cluster* 4 = Tipologi IV: Wilayah Transisi. Tipologi IV: Wilayah Transisi adalah wilayah peralihan antara Tipologi III dengan Tipologi II. Dengan demikian, urutan tingkat perkembangan tipologi wilayah dari Wilayah Tertinggal hingga Wilayah Maju sebagai berikut: (1) Tipologi I, (2) Tipologi III, (3) Tipologi IV, dan (4) Tipologi II. Indikator/penciri utama terpilih tipologi wilayah berdasarkan hasil uji beda nyata disajikan pada Tabel 8 dan kategori beberapa indikator perkembangan wilayah dan disparitas regional disajikan pada Tabel 9.

Tabel 7. Hasil Uji Beda Nyata Terhadap Penciri Utama Antar *Cluster*

No.	Indikator/Penciri Utama	F	Sig.	No.	Indikator/Penciri Utama	F	Sig.
1.	G Pertanian	1,100	0,470	19.	<b>SC LGA dan Bangunan</b>	<b>12,696</b>	<b>0,033</b>
2.	G Pertambangan dan Penggalian	,773	0,581	20.	SC Jasa Modern	2,754	0,214
3.	<b>G Industri Ekstraktif</b>	<b>227,769</b>	<b>0,000</b>	21.	<b>SC Jasa Pemerintahan Umum</b>	<b>6,137</b>	<b>0,085</b>
4.	G Industri Manufaktur	,259	0,852	22.	DS Pertanian	1,107	0,468
5.	G LGA dan Bangunan	4,051	0,140	23.	DS Pertambangan & Penggalian	1,369	0,401
6.	G Jasa Modern	2,878	0,204	24.	<b>DS Industri Ekstraktif</b>	<b>2731,477</b>	<b>0,000</b>
7.	<b>G Jasa Pemerintahan Umum</b>	<b>11,412</b>	<b>0,038</b>	25.	DS Industri Manufaktur	,250	0,858
8.	<b>S Pertanian</b>	<b>16,880</b>	<b>0,022</b>	26.	<b>DS LGA dan Bangunan</b>	<b>5,701</b>	<b>0,093</b>
9.	<b>S Pertambangan &amp; Penggalian</b>	<b>11,869</b>	<b>0,036</b>	27.	DS Jasa Modern	3,428	0,169



No.	Indikator/Penciri Utama	F	Sig.	No.	Indikator/Penciri Utama	F	Sig.
10.	S Industri Ekstraktif	1,155	0,454	<b>28.</b>	<b>DS Jasa Pemerintahan Umum</b>	<b>14,799</b>	<b>0,027</b>
<b>11.</b>	<b>S Industri Manufaktur</b>	<b>6,684</b>	<b>0,077</b>	<b>29.</b>	<b>Kepadatan Penduduk</b>	<b>93,872</b>	<b>0,002</b>
12.	S LGA dan Bangunan	,133	0,934	<b>30.</b>	<b>Persentase Penduduk Miskin</b>	<b>6,804</b>	<b>0,075</b>
<b>13.</b>	<b>S Jasa Modern</b>	<b>7,197</b>	<b>0,070</b>	<b>31.</b>	<b>G Penduduk</b>	<b>17,699</b>	<b>0,021</b>
<b>14.</b>	<b>S Jasa Pemerintahan Umum</b>	<b>36,617</b>	<b>0,007</b>	32.	G PDRB	1,604	0,354
<b>15.</b>	<b>SC Pertanian</b>	<b>9,787</b>	<b>0,047</b>	33.	G Pendapatan per Kapita	3,644	0,158
<b>16.</b>	<b>SC Pertambangan &amp; Penggalian</b>	<b>6,346</b>	<b>0,082</b>	<b>34.</b>	<b>Pendapatan per Kapita</b>	<b>5,887</b>	<b>0,090</b>
17.	SC Industri Ekstraktif	3,713	0,155	<b>35.</b>	<b>Indeks Williamson</b>	<b>5,682</b>	<b>0,094</b>
18.	SC Industri Manufaktur	,539	0,688				

Keterangan:

G = Pertumbuhan (*growth*)

DS = Indeks *Differential Shift*

S = Pangsa (*share*)

Huruf **Bold** Biru = Berbeda Nyata (Taraf Nyata 10 %)

SC = Perubahan Pangsa (*share change*)

Sumber: Hasil Analisis, Output SPSS 20

### **Tipologi I: Wilayah Tertinggal**

Region yang termasuk dalam Tipologi I: Wilayah Tertinggal adalah region Papua. Karakteristik utama tipologi ini dari aspek perkembangan struktur ekonomi wilayah bahwa sektor primer, yaitu sektor pertambangan dan penggalian masih memberikan kontribusi paling besar bagi perekonomiannya dibandingkan antar sektor dalam region Papua maupun antar tipologi, dengan rata-rata kontribusi selama 2000-2010 sebesar 49,72 persen, kemudian diikuti oleh sektor pertanian (15,35 %) dan sektor jasa modern (13,99 %). Namun demikian, sektor pertambangan dan penggalian mengalami penurunan kontribusi paling besar dibandingkan antar sektor dalam region maupun antar tipologi mencapai -26,88 persen. Sektor industri manufaktur (termasuk sektor jasa modern) dalam tipologi ini belum berkembang dengan baik, ditunjukkan dengan kontribusinya yang masih rendah (masing-masing 3,45 % dan 13,99 %). Sektor industri ekstraktif memiliki rata-rata pertumbuhan dan keunggulan kompetitif paling tinggi (masing-masing 46,76 % dan indeks *differential shift*/DS 11,54) dibandingkan antar sektor dalam region maupun antar tipologi. Sektor pertanian mengalami peningkatan kontribusi, meskipun kecil (2,03 %). Selain itu, sektor jasa pemerintahan umum memiliki pertumbuhan, kontribusi, peningkatan kontribusi, dan keunggulan kompetitif paling tinggi dibandingkan tipologi lainnya (masing-masing sebesar 10,47 %, 6,86 %, 4,66 %, dan indeks DS 1,01). Sektor LGA dan bangunan juga mengalami peningkatan kontribusi dan memiliki keunggulan kompetitif paling tinggi dibandingkan antar sektor ekonomi dalam region maupun antar tipologi mencapai 4,72 persen dan indeks DS 1,10 (Tabel 8).

Dari aspek perkembangan wilayah dan disparitas regional, karakteristik Tipologi I memiliki kepadatan penduduk paling rendah (6 jiwa/km<sup>2</sup>), namun memiliki pertumbuhan penduduk (2,92 %) dan persentase penduduk miskin (37,93 %) paling tinggi dibandingkan tipologi lainnya. Namun demikian, Tipologi I ini juga ternyata memiliki pendapatan per kapita paling tinggi (Rp 10,067 juta) dibandingkan dengan tipologi lainnya, kecuali region Kalimantan (Rp 12,453 juta) dan memiliki indeks disparitas regional paling rendah (0,1049) dibandingkan dengan tipologi lainnya, kecuali region Maluku (0,0094) (Tabel 8).

Tabel 8. Indikator Terpilih Tipologi Wilayah Berdasarkan Hasil Uji Beda Nyata ( $\alpha = 10$  %)

No.	Indikator/Penciri Utama*)	Tipologi I	Tipologi II	Tipologi III			Tipologi IV		Mean	StDev.	Sig.
		Wilayah Tertinggal	Wilayah Maju	Wilayah Sedang Berkembang (WSB)			Wilayah Transisi (Antara WSB-Wil. Maju)				
		Papua	Jawa-Bali	Nusa Tenggara	Sulawesi	Maluku	Sumatera	Kalimantan			
<b>I. Struktur Sektor Ekonomi</b>											
<b>A. Pertumbuhan Sektor Ekonomi</b>											
1.	Industri Ekstraktif	46,76	4,28	-	-	-	-6,11	-1,95	10,75	24,387	0,000
2.	Jasa Pemerintahan	10,47	4,10	6,39	5,68	4,61	6,16	7,17	6,37	2,090	0,038
<b>B. Pangsa Sektor Ekonomi</b>											
1.	Pertanian	18,35	11,82	31,81	32,86	34,43	22,04	14,92	23,75	9,261	0,022
2.	Tambang & Galian	49,72	1,54	17,04	6,73	2,44	20,49	27,19	17,88	17,017	0,036
3.	Industri Manufaktur	3,45	28,45	3,32	10,73	8,89	16,68	8,92	11,49	8,754	0,077
4.	Jasa Modern	13,99	45,86	28,91	30,45	39,69	26,93	21,31	29,59	10,700	0,070
5.	Jasa Pemerintahan	6,86	4,22	11,75	11,13	12,57	5,88	4,45	8,12	3,592	0,007
<b>C. Perubahan Pangsa Sektor Ekonomi</b>											
1.	Pertanian	2,03	-2,83	-6,80	-6,02	-3,52	0,47	-0,28	-2,42	3,324	0,047
2.	Tambang & Galian	-26,88	-0,59	0,69	-0,68	-0,43	-9,96	3,43	-4,92	10,532	0,082
3.	I.GA & Bangunan	4,72	0,40	0,02	1,43	0,32	1,55	1,58	1,43	1,588	0,033
4.	Jasa Pemerintahan	4,66	-0,49	1,58	-0,71	0,00	1,13	1,40	1,08	1,826	0,085
<b>D. Kemungkinan Kompetitif Sektor Ekonomi***)</b>											
1.	Industri Ekstraktif	11,54	0,61	-	-	-	-0,37	-0,08	2,93	5,758	0,000
2.	I.GA & Bangunan	1,10	(0,09)	(0,23)	0,34	(0,04)	0,13	0,17	0,20	0,442	0,093
3.	Jasa Pemerintahan	1,01	(0,18)	0,19	0,07	(0,10)	0,15	0,34	0,21	0,392	0,027
<b>II. Perkembangan Wilayah &amp; Disparitas</b>											
1.	Kepadatan Penduduk (jiwa/km <sup>2</sup> )	Rendah 6	Tinggi 970	Rendah 126	Rendah 85	Rendah 27	Rendah 96	Rendah 23	190,62	346,533	0,002
2.	Persentase Penduduk Miskin (%)**)	Tinggi 37,93	Sedang 15,53	Tinggi 25,41	Sedang 15,99	Tinggi 22,73	Sedang 15,82	Rendah 9,62	20,43	9,292	0,075
3.	Pertumbuhan Penduduk (%)	Tinggi 2,92	Rendah 1,04	Sedang 1,53	Sedang 1,57	Sedang 1,67	Sedang 1,64	Sedang 2,09	1,78	0,591	0,021
4.	Pendapatan Per Kapita (Rp Juta)	Tinggi 10,067	Tinggi 7,943	Rendah 3,000	Sedang 4,774	Rendah 2,613	Tinggi 8,166	Tinggi 12,453	7,00	3,688	0,09
5.	Disparitas Regional (Indeks Williamsson)	Rendah 0,1049	Tinggi 0,7671	Rendah 0,1887	Rendah 0,2395	Rendah 0,0094	Sedang 0,4891	Tinggi 0,8643	0,38	0,333	0,094

Keterangan:

\*) = Nilai Rata-rata Tahun 2000-2010

\*\*) = Nilai Rata-rata Tahun 2004-2010

\*\*\*) = Berdasarkan Indeks *Differential Shift*

Tambang &amp; Galian = Pertambangan &amp; Penggalian

Jasa Pemerintahan = Jasa Pemerintahan Umum

Sumber: Hasil Analisis

Tabel 9. Kategori Beberapa Indikator Perkembangan Wilayah dan Disparitas Regional

No	Indikator	Kategori		
		Rendah	Sedang	Tinggi
1.	Kepadatan Penduduk-KPDK (jiwa/km <sup>2</sup> )	KPDK < 150	150 ≤ KPDK ≤ 400	KPDK > 400
2.	Persentase Penduduk Miskin-PPM (%)	PPM < 10,00	10,00 ≤ PPM ≤ 20,00	PPM > 20,00
3.	Pertumbuhan Penduduk-GPDK (%)	GPDK < 1,50	1,50 ≤ GPDK ≤ 2,25	GPDK > 2,25
4.	Pendapatan Per Kapita-PK (Rp Juta)	PK < 4,500	4,500 ≤ PK ≤ 7,500	PK > 7,500
5.	Disparitas Regional-DR (Indeks Williamsson)	DR < 0,375	0,375 ≤ DR ≤ 0,575	DR > 0,575

Sumber: Berbagai Referensi (Diolah)

### **Tipologi II: Wilayah Maju**

Region Jawa-Bali termasuk dalam Tipologi II: Wilayah Maju. Karakteristik utama Tipologi II dari aspek perkembangan struktur ekonomi wilayah bahwa sektor tersier, yaitu sektor jasa modern dan sektor industri manufaktur telah mendominasi perekonomian wilayah dan memiliki kontribusi (termasuk skala ekonomi) paling besar dibandingkan antar sektor dalam region Jawa-Bali maupun antar tipologi. Rata-rata kontribusi sektor jasa modern dan sektor industri manufaktur selama 2000-2010 mencapai 45,86 persen dan 28,45 % persen. Sementara itu, kontribusi sektor pertanian hanya tinggal 11,82 persen dan mengalami penurunan kontribusi -2,83 %. Sektor jasa pemerintahan umum memiliki pertumbuhan dan kontribusi paling rendah (4,10 % dan 4,22 %) dibandingkan antara tipologi serta mengalami perlambatan pertumbuhan (-0,18). Sementara itu sektor LGA dan bangunan mengalami peningkatan kontribusi (0,40 %), namun mengalami perlambatan pertumbuhan (indeks DS 0,09). Sektor industri ekstraktif masih mengalami pertumbuhan sebesar 4,28 % dan percepatan pertumbuhan (indeks DS 0,61) (Tabel 8).

Dari aspek perkembangan wilayah dan disparitas regional, karakteristik Tipologi II memiliki kepadatan penduduk (termasuk jumlah penduduk) paling tinggi (970 jiwa/km<sup>2</sup>), namun memiliki pertumbuhan penduduk paling rendah (2,92 %) dibandingkan tipologi lainnya. Memiliki persentase penduduk miskin tergolong sedang (15,53 %), pendapatan per kapita tergolong tinggi (Rp 7,943 juta), dan memiliki disparitas regional tergolong paling tinggi (0,7671) dibandingkan tipologi lainnya, kecuali region Kalimantan (0,8643).

### **Tipologi III: Wilayah Sedang Berkembang**

Terdapat tiga region yang termasuk dalam Tipologi III: Wilayah Sedang Berkembang, yaitu region Nusa Tenggara, Sulawesi, dan Maluku. Secara umum, struktur perekonomian Tipologi III ini masih didominasi sektor pertanian (pangsa 31,81 % hingga 34,43 %) dan sektor jasa modern (pangsa 28,91 % hingga 39,69 %). Namun demikian, kontribusi sektor pertanian mengalami penurunan paling tinggi (-3,80 % hingga -6,80 %) dibandingkan antar sektor dalam Tipologi III dan antar tipologi lainnya untuk sektor tersebut. Sementara itu, sektor industri manufaktur belum berkembang dengan baik dan memiliki pangsa paling kecil (3,32 % hingga 10,73 %) dibandingkan tipologi lainnya, kecuali Tipologi I (3,45 %). Kontribusi jasa pemerintahan umum pada tipologi ini paling besar (11,13 % hingga 12,57 %) dibandingkan tipologi lainnya, namun memiliki pertumbuhan paling rendah (4,61 % hingga 6,39 %) dibandingkan tipologi lainnya, kecuali Tipologi II (4,10 %).

Dari aspek perkembangan wilayah dan disparitas regional, Tipologi III ini memiliki kepadatan penduduk tergolong rendah (27 hingga 126 jiwa/km<sup>2</sup>), pendapatan per kapita rendah (Rp 2,613 juta hingga Rp 4,774 juta), dan disparitas regional juga rendah (0,0094 hingga 0,2395). Pada tipologi ini memiliki pertumbuhan penduduk tergolong sedang (1,53 % hingga 1,67 %) dan masih memiliki persentase penduduk miskin tergolong tinggi (22,73 % hingga 25,41 %), kecuali region Sulawesi tergolong sedang (15,99 %).

### **Tipologi IV: Wilayah Transisi**

Tipologi VI: Wilayah Transisi (region Sumatera dan Kalimantan) merupakan wilayah peralihan berada antara Tipologi III: Wilayah Sedang Berkembang dengan Tipologi II: Wilayah Maju. Dari aspek perkembangan struktur ekonomi wilayah, karakteristik utama Tipologi IV ini bahwa sektor jasa modern; pertambangan dan penggalian; dan pertanian masih memiliki kontribusi paling besar dibandingkan sektor

ekonomi lainnya dengan proporsi yang hampir sama. Selama 2000-2010, kontribusi sektor jasa modern berkisar 21,31 persen hingga 26,93 persen; pertambangan dan penggalian 20,49 persen hingga 27,19 persen; dan pertanian 14,92 persen hingga 22,04 persen. Pada Tipologi VI ini di region Sumatera, sektor pertambangan dan penggalian mengalami penurunan kontribusi sebesar -9,96 persen, namun di region Kalimantan meningkat 3,34 persen (paling besar dibandingkan tipologi lainnya). Sementara itu, sektor industri ekstraktif mengalami kontraksi pertumbuhan (-1,95 % hingga -6,11 %) dan mengalami perlambatan pertumbuhan (indeks DS -0,08 hingga -0,37). Sektor jasa pemerintahan umum masih memiliki pertumbuhan paling besar (6,16 % hingga 7,17 %) dibandingkan Tipologi II dan Tipologi III dan mengalami peningkatan kontribusi, meskipun kecil (1,13 % hingga 1,40 %). Sektor LGA dan bangunan mengalami peningkatan kontribusi (1,55 % hingga 1,58 %) dan mengalami percepatan pertumbuhan (indeks DS 0,13 hingga 0,17) (Tabel 8).

Dari aspek perkembangan wilayah dan disparitas regional, karakteristik utama Tipologi IV adalah memiliki kepadatan penduduk rendah (23 hingga 96 jiwa/km<sup>2</sup>) dan pertumbuhan penduduk sedang (1,64 % hingga 2,09 %). Tipologi IV memiliki pendapatan per kapita tergolong tinggi (Rp 8,166 juta hingga Rp 12,453 juta) dan memiliki persentase penduduk miskin tergolong rendah-sedang (9,62 % hingga 15,82 %) serta disparitas regional tergolong sedang-tinggi (0,4891 hingga 0,8643) (Tabel 8).

Dari uraian deskriptif tersebut dapat diketahui perbedaan karakteristik antar tipologi wilayah. Namun demikian, secara umum terdapat beberapa kesamaan antar tipologi wilayah tersebut, yaitu: (i) sektor jasa modern mengalami peningkatan kontribusi di seluruh tipologi wilayah; (ii) sektor pertanian mengalami penurunan kontribusi, kecuali di region Sumatera dan Tipologi I (region Papua); dan (iii) jika dilihat dari kontribusi tiga sektor ekonomi utama (pertanian; industri manufaktur; jasa modern), maka sektor industri manufaktur masih memberikan kontribusi paling rendah terhadap perekonomian wilayah, kecuali Tipologi II (region Jawa-Bali), dengan struktur ekonomi pada tahun 2010: jasa modern-pertanian-industri manufaktur.

### **Faktor-faktor yang Mempengaruhi Disparitas Regional**

Estimasi faktor-faktor yang mempengaruhi disparitas regional di tujuh region selama 2000-2010 menggunakan model Regresi Data Panel Statis. Dalam model Regresi Data Panel ini, peubah tak bebas (*dependent variable*) adalah perkembangan indeks (koefisien variasi) Williamson di tujuh region selama 2000-2010. Untuk peubah bebas (*independent variable*) adalah perkembangan kontribusi/pangsa (*share*) empat sektor ekonomi utama (sektor pertanian; pertambangan dan penggalian; industri manufaktur; dan jasa modern) terhadap perekonomian di tujuh region selama 2000-2010. Dengan demikian, spesifikasi model Regresi Data Panel Statis dalam penelitian ini dapat dituliskan sebagai berikut:

$$DR_{it} = \alpha_i + \beta_1 SP_{1it} + \beta_2 STG_{2it} + \beta_3 SIM_{3it} + \beta_4 SJM_{4it} + u_{it} \dots \dots \dots (5.1)$$

dimana:

- |             |   |   |
|-------------|---|---|
| $DR_{it}$   | = | Disparitas regional (Indeks Williamson) region ke-i dan tahun ke-t                |
| $\alpha_i$  | = | Koefisien intersep region ke-i, yang merupakan skalar                             |
| $\beta$     | = | Koefisien <i>slope</i> dengan dimensi $K \times 1$ , $K$ = banyaknya peubah bebas |
| $SP_{1it}$  | = | Pangsa sektor pertanian region ke-i dan tahun ke-t                                |
| $STG_{2it}$ | = | Pangsa sektor pertambangan dan penggalian region ke-i dan tahun ke-t              |

- $SIM_{3it}$  = Pangsa sektor industri manufaktur region ke-i dan tahun ke-t  
 $SJM_{4it}$  = Pangsa sektor jasa modern region ke-i, tahun ke-t  
 $u_{it}$  =  $\mu_i + v_{it}$ , dimana  $\mu_i$  menunjukkan efek spesifik individu yang *unobservable* dan  $v_{it}$  menunjukkan faktor gangguan (*disturbance*) sisanya  
*i* = 1, 2, ..., N, menunjukkan region (Sumatera, Jawa-Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua)  
*t* = 1, 2, ..., T, menunjukkan dimensi deret waktu (tahun 2000-2010)

Berdasarkan hasil uji Hausman, model Regresi Data Panel Statis terpilih untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi disparitas regional dengan kategori seluruh region, tanpa region Jawa-Bali, dan Tipologi III adalah *Fixed Effect Model* (FEM) dengan nilai peluang (*probability-value = p-value*) *cross section F*, *Chi-square*, dan *random*  $0,000 < 0,05$  (5 %). Sedangkan nilai *Adjusted R-squared* berkisar antara 0,965 hingga 0,9979, artinya perubahan atau variasi variabel independen dapat menjelaskan 99,65 persen hingga 99,79 persen perubahan atau variasi disparitas regional, sedangkan 0,35 persen dan 0,21 persen sisanya dijelaskan variabel lainnya yang tidak ada dalam model. Sedangkan berdasarkan hasil uji *Chow*, model Regresi Data Panel terpilih untuk faktor-faktor mempengaruhi disparitas regional pada Tipologi IV adalah model *Pooled Ordinary Least Square* (PLS), dengan *p-value Cross section F* dan *Chi-square* 0,2292 dan 0,1522  $> 0,05$  dan nilai *Adjusted R-squared* sebesar 0,9987. Sedangkan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi disparitas regional pada Tipologi I dan Tipologi II menggunakan model *Pooled Ordinary Least Square* (PLS) dengan nilai *Adjusted R-squared* 0,9890 dan 0,9729 (Tabel 10).

Tabel 10. Hasil Analisis Regresi Data Panel Menggunakan Program *Eviews 6.0*

Peubah	Seluruh Region		Tanpa Region Jawa-Bali		Tipologi I Wilayah Tertinggal (Papua)		Tipologi II Wilayah Maju (Jawa-Bali)		Tipologi III Wilayah Berkembang (Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku)		Tipologi IV Wilayah Transisi (Sumatera, Kalimantan)	
	Coefficient	Prob.	Coefficient	Prob.	Coefficient	Prob.	Coefficient	Prob.	Coefficient	Prob.	Coefficient	Prob.
C	<b>1,8475</b>	<b>0,0000</b>	<b>1,6654</b>	<b>0,0000</b>	<b>1,3978</b>	<b>0,0000</b>	0,5634	0,3110	<b>0,7741</b>	<b>0,0286</b>	<b>2,1286</b>	<b>0,0000</b>
SP?	<b>-0,0220</b>	<b>0,0000</b>	<b>-0,0216</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0409</b>	<b>0,0120</b>	-0,0050	0,6260	<b>-0,0080</b>	<b>0,0365</b>	<b>-0,0206</b>	<b>0,0032</b>
STG?	<b>-0,0053</b>	<b>0,0000</b>	<b>-0,0051</b>	<b>0,0000</b>	<b>-0,0077</b>	<b>0,0060</b>	0,0031	0,7930	<b>0,0007</b>	<b>0,8493</b>	<b>-0,0105</b>	<b>0,0000</b>
SIM?	<b>-0,0209</b>	<b>0,0001</b>	<b>-0,0133</b>	<b>0,0113</b>	<b>-0,4384</b>	<b>0,0010</b>	0,0012	0,8180	<b>-0,0087</b>	<b>0,2308</b>	<b>-0,0224</b>	<b>0,0021</b>
SJM?	<b>-0,0207</b>	<b>0,0000</b>	<b>-0,0213</b>	<b>0,0000</b>	<b>-0,0106</b>	<b>0,0860</b>	0,0049	0,4330	<b>-0,0092</b>	<b>0,0371</b>	<b>-0,0222</b>	<b>0,0000</b>
R-square	0,9981		0,9982		0,9930		0,9838		0,9971		0,9989	
Adj. R-square	0,9978		0,9979		0,9890		0,9729		0,9965		0,9987	
F-statistic	3476,2850		3401,8650		217,7500		91,0800		1513,0830		3952,4770	
Prob (F-statistic)	0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	
Durbin-Watson stat	1,0452		1,4453		2,0244		2,5923		0,9304		1,1546	
Model Terpilih	FEM		FEM		PLS		PLS		FEM		PLS	
Cross Section:	p-value		p-value						p-value		p-value	
F	0,0000		0,0000						0,0000		0,2292	
Chi-square	0,0000		0,0000						0,0000		0,1522	
Random	0,0000		0,0002						0,0000			

Keterangan:

Huruf Bold = Coefisien variabel berpengaruh signifikan, nilai *probability*  $< 5$  %

Sumber: Hasil Analisis, *Output Eviews 6.0*

Berdasarkan hasil analisis Regresi Data Panel, perubahan disparitas regional (DR) selama 2000-2010 kategori seluruh region, tanpa region Jawa-Bali, dan Tipologi IV dipengaruhi oleh perubahan kontribusi/pangsa (*share*) sektor pertanian (SP); pertambangan & penggalian (STG); industri manufaktur (SIM); dan jasa modern (SJM) secara negatif (berbanding terbalik). Artinya pengembangan aktivitas atau peningkatan kontribusi keempat sektor ekonomi tersebut dapat menurunkan disparitas regional (mengarah pemerataan/ konvergensi antar provinsi dalam region). Perubahan disparitas

regional (DR) pada Tipologi I dipengaruhi oleh perubahan kontribusi sektor pertanian (SP) secara positif/berbanding lurus (peningkatan kontribusi sektor pertanian dapat meningkatkan kesenjangan/disvergensi antar provinsi dalam region Papua) dan perubahan kontribusi sektor pertambangan & penggalian (STG); industri manufaktur (SIM); dan jasa modern (SJM) secara negatif. Sedangkan perubahan disparitas regional (DR) pada Tipologi III dipengaruhi oleh perubahan kontribusi sektor pertambangan & penggalian (STG) secara positif (peningkatan kontribusi sektor pertambangan & penggalian dapat meningkatkan kesenjangan/disvergensi antar provinsi dalam region) dan perubahan kontribusi sektor pertanian (SP); industri manufaktur (SIM); dan jasa modern (SJM) secara negatif. Seluruh variabel independen pada Tipologi II (Jawa-Bali) tidak berpengaruh secara nyata terhadap perubahan disparitas regional ( $p\text{-value} > 0,05$ ).

Negara Indonesia sebagai negara kepulauan, memiliki wilayah yang luas, perbedaan karakteristik geografis dan demografis, perbedaan kelimpahan sumberdaya sebagai *endowment factor* yang dimiliki antar wilayah/daerah, dan perbedaan ketersediaan infrastruktur wilayah berpotensi mengakibatkan terjadinya ketimpangan atau disparitas antar wilayah atau daerah. Disparitas antar wilayah atau daerah sebenarnya merupakan fenomena universal, terjadi di semua negara, baik negara sedang berkembang maupun negara maju. Menurut Fei dan Ranis (1964); Kuznets (1966); Adelman dan Moris (1973); Todaro dan Smith (2006); dan Sjafrizal (2008), terdapat beberapa faktor yang mengakibatkan terjadinya ketimpangan antar wilayah, antara lain yaitu: tingkat perkembangan aktivitas ekonomi wilayah, kondisi geografis dan demografi, ketersediaan sumberdaya alam sebagai *endowment factor*, konsentrasi aktivitas ekonomi wilayah, dan kebijakan alokasi dana pembangunan (investasi) antar wilayah. Menurut Murty (2000), bahwa ketimpangan antar wilayah disebabkan antara lain oleh investasi, infrastruktur, aktivitas ekonomi seperti industri, perdagangan, perbankan, dan asuransi yang memberikan hasil yang lebih besar, cenderung terkonsentrasi di daerah yang maju.

Untuk membangun keterkaitan dan mengurangi ketimpangan antar wilayah, menurut Rustiadi *et al.* (2009), bahwa dalam pengembangan wilayah selain melalui strategi sisi pasokan dan permintaan (*supply side and demand side strategy*), juga harus didasarkan atas prinsip strategi sinergi keterkaitan antar wilayah (*inter-regional linkages*). Terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan secara simultan untuk membangun keterkaitan antar wilayah dan mengurangi terjadinya ketimpangan, yaitu dengan mendorong: pemerataan investasi pada semua sektor dan wilayah secara simultan; pemerataan permintaan (*demand*), bahwa setiap industri dan wilayah harus dikembangkan secara simultan sehingga dapat menciptakan *demand* untuk tiap-tiap produk; dan pemerataan tabungan, dimana tabungan ini sangat diperlukan untuk dapat memacu investasi.

## KESIMPULAN DAN IMPLIKASINYA

### Simpulan

1. Selama 2000-2010, sektor jasa modern memberikan kontribusi paling besar terhadap perekonomian region Sumatera, Jawa-Bali, Maluku, dan nasional, sektor pertanian masih mendominasi perekonomian region Nusa Tenggara dan Sulawesi, dan sektor pertambangan & penggalian masih mendominasi perekonomian region Kalimantan dan Papua. Sementara itu, sektor industri manufaktur masih memberikan kontribusi paling kecil bagi perekonomian regional dibandingkan sektor pertanian dan sektor

- jasa modern (kecuali region Jawa). Terjadi gejala de-industrialisasi yang ditunjukkan oleh kecenderungan penurunan kontribusi sektor industri manufaktur terhadap perekonomian region Jawa-Bali, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan nasional serta mengalami perlambatan pertumbuhan di region Jawa-Bali, Kalimantan, Maluku, dan nasional.
2. Selama 2000-2010 telah terjadi transformasi ekonomi dalam struktur ekonomi region Sumatera, Nusa Tenggara, Sulawesi, dan Papua, namun pola transformasi ekonomi tersebut tidak berjalan secara bertahap, mengalami lompatan (*jumping*) pergeseran kontribusi dari sektor pertanian/sektor pertambangan dan penggalian langsung oleh sektor jasa modern. Transformasi struktur sektor-sektor ekonomi dalam perekonomian nasional tidak disertai transformasi tenaga kerja sektoral secara proporsional, dimana kontribusi sektor pertanian yang semakin kecil, namun memiliki serapan/pangsa tenaga kerja yang masih besar, sebaliknya kontribusi sektor industri yang cukup besar, namun memiliki serapan/pangsa tenaga kerja yang rendah.
  3. Sektor jasa modern memiliki nilai strategis, karena peningkatan skala aktivitas atau kontribusi sektor tersebut dapat meningkatkan pendapatan per kapita regional (kecuali di region Papua) sekaligus menurunkan jumlah penduduk miskin regional (kecuali di region Nusa Tenggara).
  4. Selama 2000-2010, disparitas antar region masih tergolong rendah, namun menunjukkan kecenderungan meningkat. Disparitas antar provinsi dalam region untuk region Kalimantan dan Jawa-Bali tergolong tinggi, region Sumatera tergolong sedang, dan region Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua tergolong rendah. Ketimpangan antar provinsi dalam region menunjukkan kecenderungan menurun, kecuali region Jawa-Bali dan Nusa Tenggara. Disparitas intra region memberikan kontribusi paling besar terhadap disparitas regional dibandingkan disparitas antar region.
  5. Berdasarkan ciri atau karakteristik indikator/penciri utama perkembangan struktur ekonomi dan disparitas regional di tujuh region selama 2000-2010, terdapat empat tipologi wilayah, yaitu: Tipologi I: Wilayah Tertinggi (region Papua) dengan dominasi struktur ekonomi adalah sektor pertambangan & penggalian dan memiliki disparitas regional rendah; Tipologi II: Wilayah Maju (region Jawa-Bali) dengan dominasi struktur ekonomi sektor jasa modern dan disparitas regional tinggi; Tipologi III: Wilayah Sedang Berkembang (region Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku) dengan dominasi sektor pertanian dan sektor jasa modern dan tingkat disparitas rendah; dan Tipologi IV: Wilayah Transisi (region Sumatera, Kalimantan) dengan dominasi struktur ekonomi sektor pertambangan & penggalian dan sektor jasa modern dan tingkat disparitas regional sedang-tinggi.
  6. Selama 2000-2010, perubahan disparitas regional kategori seluruh region, tanpa region Jawa-Bali, dan Tipologi IV dipengaruhi oleh perubahan kontribusi sektor pertanian; pertambangan & penggalian; industri manufaktur, dan jasa modern secara negatif. Perubahan disparitas regional pada Tipologi I dipengaruhi oleh perubahan kontribusi sektor pertanian secara positif dan perubahan kontribusi sektor pertambangan & penggalian; industri manufaktur; dan jasa modern secara negatif. Sedangkan perubahan disparitas regional pada Tipologi III dipengaruhi oleh perubahan kontribusi sektor pertambangan & penggalian secara positif dan perubahan kontribusi sektor pertanian; industri manufaktur; dan jasa modern secara negatif. Seluruh variabel independen pada Tipologi II tidak berpengaruh secara nyata terhadap perubahan disparitas regional.

### Rekomendasi Kebijakan

Rekomendasi kebijakan ini didasarkan atas karakteristik perkembangan struktur ekonomi dan disparitas regional serta faktor-faktor yang mempengaruhinya di enam region selama 2000-2010.

1. Peningkatan skala aktivitas dan kontribusi sektor industri manufaktur. Hal ini karena terjadinya gejala de-industrialisasi dalam perekonomian region Jawa-Bali, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan nasional dan terjadinya transformasi ekonomi regional yang tidak bertahap, kecuali pada perekonomian region Jawa-Bali dan nasional.
2. Peningkatan dan pengembangan kualitas SDM sektor pertanian dan peningkatan keterkaitan antara sektor pertanian dengan sektor industri manufaktur. Hal ini karena dalam proses transformasi ekonomi nasional tidak terjadi transfer tenaga kerja sektor pertanian ke sektor industri manufaktur secara proporsional.
3. Peningkatan skala aktivitas atau kontribusi sektor jasa modern dalam perekonomian regional. Hal ini karena peningkatan kontribusi sektor tersebut dapat meningkatkan pendapatan per kapita regional (kecuali di region Papua) sekaligus menurunkan jumlah penduduk miskin regional (kecuali di region Nusa Tenggara).
4. Pengembangan dan peningkatan kontribusi sektor pertanian (kecuali Tipologi I); pertambangan & penggalian (kecuali Tipologi III); industri manufaktur, dan jasa modern di seluruh region, tanpa region Jawa-Bali, dan Tipologi IV. Hal ini karena peningkatan kontribusi sektor tersebut dapat menurunkan disparitas regional (meningkatkan pemerataan/konvergensi).
5. Untuk mempercepat pemerataan pertumbuhan ekonomi antar wilayah (region) perlu dikembangkan pusat-pusat pertumbuhan wilayah baru melalui pengembangan sektor industri manufaktur dan sektor jasa modern yang berbasis potensi dan sumberdaya lokal, agar pengembangan wilayah tersebut tidak menciptakan ketimpangan baru.
6. Untuk meningkatkan aktivitas perekonomian wilayah dan pendapatan per kapita serta mengurangi kemiskinan dan ketimpangan antar sektor maupun antar wilayah, maka perlu dilakukan pemerataan investasi antar sektor maupun antar wilayah secara seimbang agar sektor-sektor ekonomi dan wilayah tersebut dapat tumbuh dan berkembang secara seimbang sesuai potensi, sumberdaya, dan kapasitas yang dimilikinya.
7. Pemerintah, dalam hal ini pemerintah pusat dan pemerintah provinsi di dalam menyusun kebijakan pembangunan ekonomi daerah seharusnya memperhatikan karakteristik dan tipologi wilayah berdasarkan perkembangan struktur ekonomi dan disparitas regional serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

### DAFTAR PUSTAKA

- Adelman I, Morris CT. 1971. *Economic Growth and Social Equity in Developing Countries*. Stanford, CA: Stanford University Press.
- Badan Pusat Statistik. 2012. *Data Strategis Indonesia 2011*. Badan Pusat Statistik. Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 2012. *Laporan Perekonomian Indonesia 2011*. Badan Pusat Statistik. Jakarta.
- Budiharsono, S. 1996. *Transformasi Struktural dan Pertumbuhan Ekonomi Antardaerah, 1987-1995*. Disertasi. Program Studi Ilmu-ilmu Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan. IPB. Bogor.



- Chenery, H.B. 1980. *Structural Change and Development Policy*. World Bank Reserch Publication.
- Eichengreen B, D. Park, dan K. Shin. 2013. *Growth Slowdowns Redux: New Evidence on the Middle-Income Trap*. Working Paper 18673. Nber Working Paper Series. National Bureau of Economic Research. 1050 Massachusetts Avenue. Cambridge, MA 02138.
- Hadi, S. 2001. *Studi Dampak Kebijakan Pembangunan terhadap Disparitas Ekonomi Antarwilayah (Pendekatan Analisis SNSE)*. Disertasi. Program Studi Ilmu-ilmu Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan. IPB. Bogor.
- Djojohadikusumo, S. 1994. *Perkembangan Pemikiran Ekonomi: Dasar Ekonomi Pertumbuhan dan Ekonomi Pembangunan*. LP3ES. Jakarta.
- Juanda, B. dan Junaidi. 2012. *Ekonometrika Deret Waktu, Teori dan Aplikasi*. Institut Pertanian. Edisi Kedua. Bogor Press, IPB Bogor.
- Kurniawan, B. 2011. *Transformasi Struktural Perekonomian Indonesia dalam Kerangka Model Input Output Tahun 1971-2008*. Tesis. Program Studi Ilmu Ekonomi. IPB. Bogor.
- Kuznets, S. 1955. *Economic Growth and Income Inequality*. American Economic Review 45, 1-28.
- Lewis, W.A. 1954. *Economic Development with Unlimited Supplies of Labour*. Manchester School of Economic and Social Studies.
- Mellor, J.W. 1973. *Accelerated Growth in Agricultural Production and the Intersectoral Transfer of Resources*. Jurnal Economic Development and Cultural Change 22.
- Murty. 2000. *Regional Disparities: Need and Measures for Balanced Development*. New Delhi: Kanishka Publishers.
- Nazara, S. 2010. *Pemerataan Antardaerah sebagai Tantangan Utama Transformasi Struktural Pembangunan Ekonomi Indonesia Masa Depan*. Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap Bidang Ilmu Ekonomi, FE UI, Maret 2010.
- Pravitasari, A. E. 2009. *Dinamika Perubahan Disparitas Regional di Pulau Jawa Sebelum dan Setelah Kebijakan Otonomi Daerah*. Tesis. Program Studi Ilmu Perencanaan Wilayah. IPB. Bogor.
- Priyarsono DS. 2011. *Dari Pertanian ke Industri; Analisis Pembangunan dalam Perspektif Ekonomi Regional*. IPB Press. Bogor.
- Rustiadi, E., S. Saefulhakim dan D.R. Panuju. 2009. *Perencanaan dan Pengembangan Wilayah*. CrestPent Press dan Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.
- Satrio, W.R. (2009). *Analisis Ketimpangan Pendapatan Antar Pulau di Negara Indonesia*. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Manajemen. Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Sjafrizal. 2008. *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi*. Sumatera Barat: Pranita Offset.
- Tambunan, T. 2001. *Perekonomian Indonesia: Teori dan Temuan Empiris*. Penerbit Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Thomas, Vinod., Mansoor Dailami, Ashok Dhareshwar, Ramon E. Lopez, Daniel Kaufmann, Nalin Kishor, and Yang Wang. 2000. *The Quality of Growth*. New York. Oxford University Press.
- Todaro, M.P dan S.C. Smith. 2006. *Pembangunan Ekonomi*. Edisi Kesembilan. Terjemahan: Haris Munandar. Penerbit Erlangga. Jakarta.

Winoto, J. 1996. *Bahan Ajaran Transformasi Struktur Perekonomian dan Ketenagakerjaan Nasional*. Program Pascasarjana, Program Studi Ilmu Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan. Institut Pertanian Bogor. Bogor.